

# RENCANA AKSI TAHUNAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Kabupaten Pasuruan  
Tahun **2025**



Bappelitbangda  
Kabupaten Pasuruan



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dapat selesai sesuai rencana.

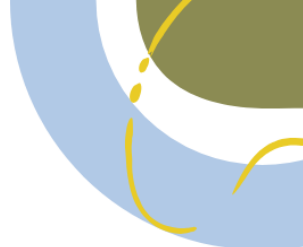
Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyadari bahwa pengurangan kemiskinan memerlukan sinergi bersama elemen termasuk perangkat daerah maupun masyarakat yang akan membuat target penanggulangan kemiskinan dapat tercapai dengan baik dan berkelanjutan. Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pasuruan ini pada intinya memuat strategi, program dan kegiatan hingga sub kegiatan yang hendak dicapai dalam penanggulangan kemiskinan pada dimensi Pendidikan, Kesehatan, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, dan termasuk Lokasi prioritas berdasarkan kecamatan. Hal ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan pencapaian target penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 yaitu sebesar 8,15%.

Akhirnya, Terimakasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam rangka penyusunan RAT Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025. Dokumen ini merupakan komitmen aksi nyata bersama dalam upaya menurunkan angka kemiskinan demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan menuju Pasuruan Cemerlang.

Pasuruan, 8 Januari 2025  
Kepala Bappelitbangda  
Kabupaten Pasuruan  
Selaku Sekretaris TKPK  
Kabupaten Pasuruan



**BAKTI JATI PERMANA, S.Sos., MM**

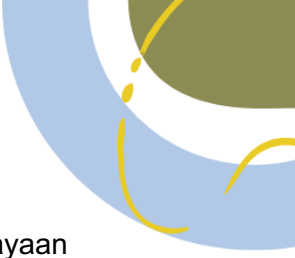


## RINGKASAN EKSEKUTIF

Penanggulangan kemiskinan menjadi tujuan utama dari 17 tujuan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) yang harus menjadi tema pembangunan. Tujuan tersebut melatari berbagai tujuan pembangunan lainnya seperti infrastruktur, pariwisata, pangan dan energi dan lain-lain. Akselerasi program lintas sektor untuk menanggulangi kemiskinan mutlak diperlukan, mulai dari reformasi perlindungan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, dan peningkatan kemandirian ekonomi kelompok miskin dan rentan. Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 ini disusun sebagai salah satu instrumen untuk menyinergikan peran pemerintah dan nonpemerintah dalam menanggulangi kemiskinan.

Hasil kinerja penanggulangan kemiskinan Kabupaten Pasuruan tahun 2024 menunjukkan penurunan yang signifikan. Konsentrasi utamanya adalah pada penurunan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan dapat mencapai 0% pada tahun 2024 sebagaimana intruksi dari Presiden Joko Widodo saat itu. Hasilnya, capaian kemiskinan ekstrem Kabupaten Pasuruan tahun 2024 masih belum mencapai target Nasional sebesar 0% karena hanya mencapai 0,32%, menurun 0,14% dari capaian tahun 2023 yaitu sebesar 0,46% sebanyak 7,61 ribu jiwa. Selain itu indikator kemiskinan lainnya juga mengalami penurunan seperti Indeks Kedalaman Kemiskinan yang pada tahun 2024 mencapai 1,09 mengalami penurunan sebesar 0,13 poin dibandingkan Maret 2023 yaitu 1,22. Kemudian Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pasuruan Maret 2024 sebesar 0,21, mengalami penurunan sebesar 0,05 poin dibandingkan Maret 2023 yaitu 0,26. Indeks gini Kabupaten Pasuruan dalam periode tahun 2019-2024 mengalami fluktuasi dan termasuk dalam kategori moderat/sedang (berada pada interval 0,3 – 0,5). Capaian indeks Gini Rasio Kabupaten Pasuruan tahun 2024 sebesar 0,331, lebih rendah dari capaian GINI Provinsi sebesar 0,373. Sedangkan tingkat kemiskinan Kabupaten Pasuruan tahun 2024 sebesar 8,63%, lebih rendah dari Jatim sebesar 9,79%.

Sementara itu, Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 juga telah berhasil menurunkan capaian angka kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Pasuruan pada Maret 2024 sebesar 8,63 persen, turun 0,61 persen poin terhadap Maret 2023 yang sebesar 9,24 persen. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pasuruan pada Maret 2024 sebesar 144,84 ribu orang, berkurang 9,25 ribu orang terhadap Maret 2023 yang sebesar 154,09 ribu orang. Capaian tahun 2023 merupakan peningkatan tertinggi dari Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Peningkatan ini dikarenakan adanya peningkatan garis kemiskinan kemudian tidak diimbangi dengan pengeluaran masyarakat tiap bulan sehingga menjadi penyebab meningkatnya persentase dan jumlah penduduk miskin. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengurangi kemiskinan antara lain dengan menurunkan beban pengeluaran melalui perlindungan sosial dan meningkatkan pendapatan melalui produktivitas dan inklusi keuangan. Kemudian penurunan pada tahun 2024 dikarenakan adanya strategi peningkatan kesejahteraan keluarga dengan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik,



pemberian bantuan social, pemberian keterampilan, dan pemberdayaan Masyarakat.

Program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan dilakukan sesuai amanat Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan No 102 Tahun 2023, yaitu melalui strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, strategi peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat, serta strategi pengurangan wilayah kantong-kantong kemiskinan. Ketiga strategi tersebut didukung beberapa strategi penunjang sebagai katalisator dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, yang meliputi pertumbuhan yang inklusif, data yang terintegrasi, sumber daya pemerintah yang unggul dan berintegritas, regulasi yang adaptif, inklusivitas pada sistem pembangunan, serta penyelenggaraan konvergensi, graduasi, dan replikasi.

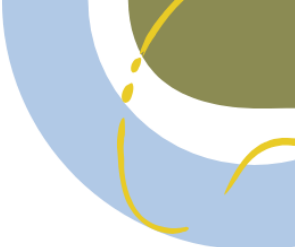
Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah mengimplementasikan program-program penanggulangan kemiskinan yang berkaitan dengan strategi-strategi tersebut, meskipun masih terdapat kesenjangan yang perlu diperbaiki kedepannya. Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan pada tahun 2024 yakni 1. Peningkatan Kebutuhan Dasar; 2. Meningkatkan Pemerataan Pendapatan; dan 3. Menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Untuk mendukung kebijakan tersebut terdapat 43 program, 63 kegiatan, dan 132 sub kegiatan dalam rencana aksi upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan.

Kabupaten Pasuruan telah menetapkan target kemiskinan Kabupaten sebesar 8,15% pada tahun 2025. Dalam rangka mencapai target penanggulangan kemiskinan Kabupaten Pasuruan perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan maupun strategi untuk menstimulasi percepatan prioritas program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Pasuruan. Diharapkan program-program tersebut target pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara bersamaan dapat terwujud.

## DAFTAR ISI

|                                                                                              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                   | <b>i</b>   |
| <b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>                                                             | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                      | <b>iv</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                                                                     | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                                                                   | <b>vii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                                | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                     | 1          |
| 1.2 Landasan Hukum.....                                                                      | 5          |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....                                                                  | 5          |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....                                                              | 6          |
| <b>BAB II KONDISI KEMISKINAN KABUPATEN PASURUAN .....</b>                                    | <b>8</b>   |
| 2.1 Perkembangan Kondis Kemiskinan .....                                                     | 8          |
| 2.1.1 Garis Kemiskinan .....                                                                 | 9          |
| 2.1.2 Jumlah Penduduk Miskin.....                                                            | 11         |
| 2.1.3 Persentase Penduduk Miskin .....                                                       | 12         |
| 2.1.4 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) .....                                                 | 13         |
| 2.1.5 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) .....                                                 | 14         |
| 2.1.6 Indeks Gini (Kesenjangan Pendapatan).....                                              | 15         |
| 2.1.7 Kemiskinan Ekstrem.....                                                                | 16         |
| 2.2 Pendidikan.....                                                                          | 21         |
| 2.2.1 Rata-Rata Lama Sekolah .....                                                           | 22         |
| 2.2.2 Harapan Lama Sekolah (HLS) .....                                                       | 23         |
| 2.2.3 Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang<br>berkualifikasi Pendidikan Tinggi ..... | 24         |
| 2.3 Kesehatan .....                                                                          | 25         |
| 2.3.1 Angka Kematian Bayi (AKB).....                                                         | 25         |
| 2.3.2 Angka Kematian Ibu (AKI) .....                                                         | 29         |
| 2.3.3 Angka Harapan Hidup (AHH) .....                                                        | 31         |
| 2.3.4 Persentase Balita Gizi Buruk.....                                                      | 32         |
| 2.4 Ketenagakerjaan.....                                                                     | 33         |
| 2.4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....                                                | 33         |
| 2.4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka .....                                                     | 35         |
| 2.5 Infrastruktur .....                                                                      | 36         |

|                                                                                                |                                                                                       |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.6                                                                                            | Pertumbuhan Ekonomi .....                                                             | 38        |
| 2.6.1                                                                                          | Inflasi .....                                                                         | 40        |
| <b>BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI (RAT) KEMISKINAN<br/>KABUPATEN PASURUAN .....</b> |                                                                                       | <b>41</b> |
| 3.1                                                                                            | Hasil Evaluasi Kinerja Tahun Sebelumnya.....                                          | 41        |
| 3.2                                                                                            | Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan.....                                 | 63        |
| <b>BAB IV MATRIKS TARGET KEBERHASILAN DAN LOKUS PRIORITAS .....</b>                            |                                                                                       | <b>71</b> |
| 4.1                                                                                            | Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten<br>Pasuruan Tahun 2025 ..... | 71        |
| 4.2                                                                                            | Lokus Prioritas .....                                                                 | 86        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                     |                                                                                       | <b>98</b> |



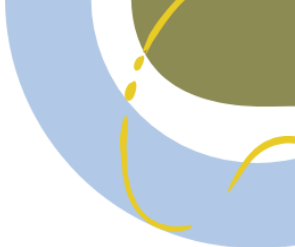
## DAFTAR TABEL

|            |                                                                                                       |    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2. 1 | Posyandu Aktif di Kabupaten Pasuruan .....                                                            | 27 |
| Tabel 2. 2 | Perkembangan Jumlah Balita Gizi Buruk Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024 .....                        | 33 |
| Tabel 3. 1 | Hasil Evaluasi Kinerja Tahun Sebelumnya Kabupaten Pasuruan..                                          | 42 |
| Tabel 3. 2 | Program Prioritas Pembangunan Daerah .....                                                            | 64 |
| Tabel 4. 1 | Matriks Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 .....                    | 72 |
| Tabel 4. 2 | Sebaran Data Kemiskinan Ekstrem Percentil 1 Per Desa/Kelurahan di Kabupaten Pasuruan tahun 2024 ..... | 90 |

## DAFTAR GAMBAR

|              |                                                                                                                        |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. 1  | Sustainable Development Goals (SDGs) .....                                                                             | 2  |
| Gambar 1. 2  | Perbandingan Tingkat Kemiskinan Nasional, Jawa Timur, dan Kabupaten Pasuruan .....                                     | 3  |
| Gambar 2. 1  | Garis Kemiskinan Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024 .....                                                              | 10 |
| Gambar 2. 2  | Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024 .....                                                        | 11 |
| Gambar 2. 3  | Kemiskinan Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024.....                                                                     | 12 |
| Gambar 2. 4  | Indeks Kedalamanm Kemiskinan (P1) di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024.....                                           | 14 |
| Gambar 2. 5  | Perkembangan Indeks Keparahannya Kemiskinaaan (P2) di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024 .....                         | 15 |
| Gambar 2. 6  | Indeks Gini Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024 .....                                                                   | 16 |
| Gambar 2. 7  | Perkembangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024.....                                                | 17 |
| Gambar 2. 8  | Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.....                                                             | 18 |
| Gambar 2. 9  | Jumlah Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Pasuruan .....                                                                     | 18 |
| Gambar 2. 10 | Persentase Kemiskinan Ekstrem berdasarkan Jenis Pekerjaan .                                                            | 19 |
| Gambar 2. 11 | Individu Kemiskiaann Ekstrem Berdasarkan Tingkat Pendidikan .                                                          | 20 |
| Gambar 2. 12 | Persentase Penduduk Miskin Ekstrem berdasarkan Kepemilikan Tempat Tinggal .....                                        | 21 |
| Gambar 2. 13 | Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024 .....                                                        | 22 |
| Gambar 2. 14 | Harapan Sekolah di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024.....                                                             | 24 |
| Gambar 2. 15 | Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024 .. | 25 |
| Gambar 2. 16 | Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Pasuruan.....                                                                   | 26 |
| Gambar 2. 17 | Perkembangan Strata Posyandu Balita Puri 3 Tahun Terakhir....                                                          | 29 |
| Gambar 2. 18 | Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Pasuruan .....                                                                   | 30 |
| Gambar 2. 19 | Angka Harapan Hidup di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024 .....                                                        | 31 |
| Gambar 2. 20 | Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024 .....                                               | 32 |
| Gambar 2. 21 | Perkembangan TPAK Kabupaten Pasuruan.....                                                                              | 34 |

|                                                                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2. 22 Perkembangan TPAK Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Perempuan .....                                                                  | 35 |
| Gambar 2. 23 Perbandingan Perkembangan TPT Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024 .....                                   | 36 |
| Gambar 2. 24 Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024 ..... | 37 |
| Gambar 2. 25 Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023 .....                                        | 38 |
| Gambar 2. 26 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024 .....                          | 39 |
| Gambar 2. 27 Inflasi Kabupaten Pasuruan/Kota Probolinggo, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024 .....                                       | 40 |
| Gambar 4. 1 Peta Sebaran Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Pasuruan ....                                                                         | 86 |
| Gambar 4. 2 Grafik Wilayah Indeks Kesulitan Geografis (IKG) .....                                                                              | 87 |
| Gambar 4. 3 Grafik Wilayah Indeks Dimensi Pelayanan Dasar .....                                                                                | 88 |
| Gambar 4. 4 Grafik Wilayah Indeks Dimensi Infrastruktur .....                                                                                  | 89 |
| Gambar 4. 5 Grafik Wilayah Indeks Dimensi Aksesibilitas .....                                                                                  | 89 |



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan pokok yang dialami oleh semua negara. Menurut Bank Dunia, definisi kemiskinan adalah kehilangan kesejahteraan (well-being) yang artinya kondisi serba kekurangan yang mengakibatkan seseorang tidak mampu mencapai derajat hidup layak. Badan Pusat Statistik (BPS) mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun nonmakanan. Secara umum, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi saat seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Kemiskinan menyebabkan ketidakmampuan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan pada akhirnya berpengaruh terhadap ketidakmampuan memenuhi kebutuhan gizi. Hal ini menyebabkan adanya penurunan tingkat kesehatan masyarakat. Selain berdampak pada kesehatan, kemiskinan juga mengakibatkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan akan pendidikannya. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan masyarakat semakin tidak mampu bersaing dalam angkatan kerja. Pada akhirnya terciptalah pengangguran, dan masyarakat miskin tidak dapat keluar dari lingkaran kemiskinan.

Tujuan mengakhiri kemiskinan menjadi tujuan utama dari 17 tujuan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu **“Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk di Mana Pun”** (*End poverty in all its forms everywhere*). Tujuan utama tersebut harus menjadi tema pembangunan, agenda utama dan berkelanjutan yang melatari berbagai tujuan pembangunan lainnya seperti infrastruktur, pariwisata, pangan dan energi dan lain-lain. Upaya untuk mengakselerasi pencapaian target pada Tujuan 1 TPB/SDGs, tidak cukup hanya dilihat dari seberapa banyak alokasi anggaran yang telah dikeluarkan baik oleh pemerintah maupun nonpemerintah. Tetapi, juga seberapa efektif anggaran tersebut membantu dalam mempercepat target tercapai. Ketepatan lokus, fokus dan modus menjadi sentral dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Untuk mewujudkan ketepatan tersebut, dibutuhkan

data dan informasi yang valid dan mutakhir. Penyusunan kebijakan harus berbasis pada bukti. Pada sisi yang lain, kebijakan yang inklusif penting untuk diarusutamakan untuk memastikan tidak ada yang tertinggal dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

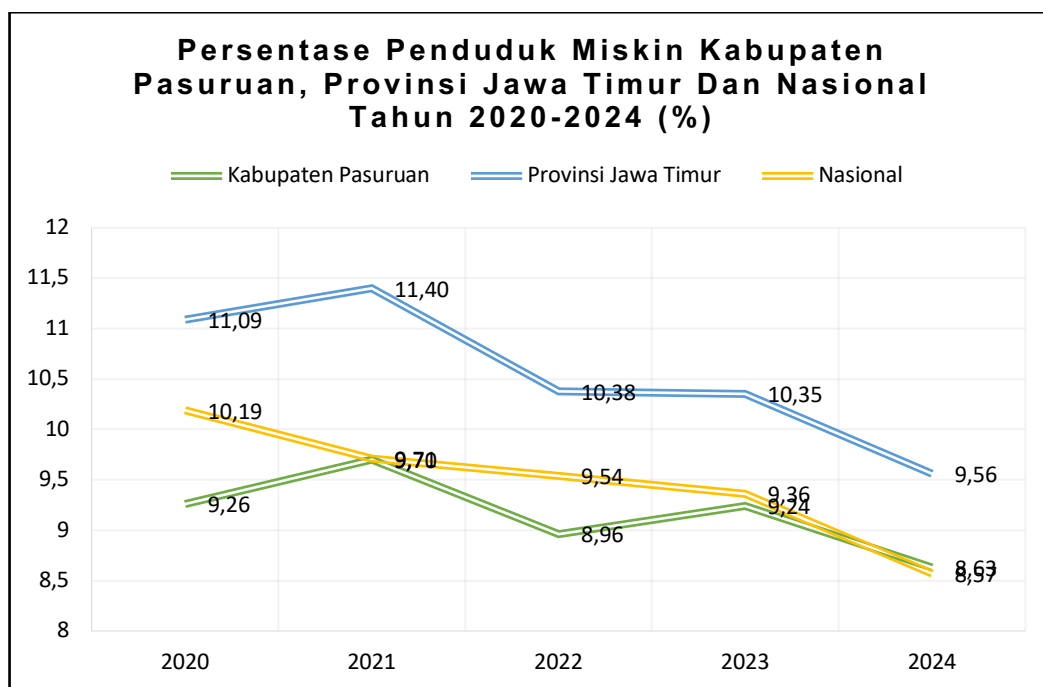


**Gambar 1. 1 Sustainable Development Goals (SDGs)**

Masalah kemiskinan harus dilihat dalam kerangka multidimensi, mengingat kemiskinan bukan hanya terkait pendapatan, melainkan karena menyangkut beberapa hal, seperti kerentanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin serta pemenuhan hak dasar masyarakat. Kemiskinan ditempatkan dalam kerangka multidimensi, yaitu melihat kemiskinan dari berbagai dimensi dan memandang penyebab kemiskinan dari berbagai sisi. Cox (2004) menyebutkan beberapa penyebab kemiskinan yang terbagi dalam beberapa dimensi tersebut meliputi: 1) Kemiskinan yang diakibatkan oleh globalisasi, dimana ada negara pemenang dengan negara kalah; 2) Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan, berkaitan dengan kemiskinan perdesaan dan kemiskinan perkotaan; 3) Kemiskinan sosial, yang berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat yang tidak menguntungkan beberapa kelompok dalam masyarakat; dan 4) Kemiskinan Konsekuensial, dimana terdapat faktor-faktor eksternal yang menyebabkan kemiskinan seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, tingginya jumlah penduduk, dan pandemi.

Beberapa factor penyebab tersebut menjadi tanggungjawab dari pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk menanggulangi

masalah kemiskinan. Tingkat Kemiskinan direpresentasikan oleh capaian Persentase Penduduk Miskin. Adapun capaian kemiskinan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 menjadi salah satu permasalahan serius dikarenakan adanya peningkatan capaian yang signifikan. Namun pada tahun 2024 capaian kemiskinan Kabupaten Pasuruan berhasil menurun menjadi 8,63. Adapun perbandingan capaian angka kemiskinan Nasional, Jawa Timur, dan Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:



**Gambar 1. 2 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Nasional, Jawa Timur, dan Kabupaten Pasuruan**

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa secara umum kondisi kemiskinan di Kabupaten Pasuruan berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Persentase Penduduk Miskin mencapai 8,36. Sementara apabila dibandingkan dengan target sebesar 8,42, maka Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pasuruan tahun 2024 telah mencapai target. Kondisi tersebut dikarenakan Sebagian besar program pendukung Persentase Penduduk Miskin masih telah mencapai target serta adanya dukungan dari berbagai pihak untuk mencapainya.

Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu *end goals* dari 17 tujuan di dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/ SDGs). Dengan pertimbangan bahwa kemiskinan masih menjadi masalah



utama di berbagai negara, maka **“penghapusan kemiskinan dan kelaparan”** pada 2030 menjadi **“tulang punggung”** dari tujuan agenda pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2030, Tujuan 1 TPB/SDGs menargetkan tidak ada lagi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem (pengeluaran per kapita kurang dari US\$1.25/hari PPP). Selain itu, tujuan tersebut juga menargetkan untuk mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.

Presiden Republik Indonesia memberikan arahan bahwa kemiskinan ekstrem di Indonesia harus dihapuskan hingga 0 persen. Namun sampai pada tahun 2024, Kabupaten Pasuruan masih belum mampu mencapai target yang ditentukan yaitu mencapai 0% Kemiskinan Ekstrem. Hal tersebut menunjukkan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan mampu menjangkau pada tingkat kemiskinan ekstrem. Maka dari itu diperlukan upaya-upaya serta langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi masalah secara cepat dan tepat. Secara cepat dalam arti melakukan Gerakan program dengan segera untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan. Secara tepat artinya sasaran kebijakan penanggulangan kemiskinan ditujukan kepada orang yang tepat. Dalam hal ini adalah tidak hanya kepada penduduk miskin, persentase penduduk miskin dan jumlah penduduk miskin, tapi juga kepada penduduk miskin ekstrem secara menyeluruh di Kabupaten Pasuruan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pasuruan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dalam rangka untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan fungsi yang dimaksud maka dipandang perlu menyusun dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kabupaten Pasuruan bidang penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025.

Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) bidang Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 ini disusun sebagai salah satu instrumen untuk mensinergikan peran Pemerintah dan non pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Penyusunan dokumen dengan berbasis pada data dan informasi yang valid diharapkan dapat meminimalisir deviasi kebijakan dengan kebutuhan di



lapangan. Pada akhirnya, keberadaan RAT Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi instrumen TKPK dan setiap pemangku kepentingan untuk dapat bersama-sama mempercepat pencapaian target penurunan kemiskinan, dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan bagi semua.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan Hukum Rencana Aksi Tahun Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 tentang Percepatan penanggulangan kemiskinan yang mendelegasikan pembentukan tugas pokok dan fungsi TKPK di daerah.
2. Instruksi Presiden No. 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan sebagai arah implementasi program – program percepatan penanggulangan kemiskinan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 tahun 2010 tentang TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengatur fungsi TKPL dalam koordinasi dan pengendalian.
4. Keputusan Presiden No. 10 tahun 2011 tentang koordinasi peningkatan dan perluasan program – program rakyat.
5. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 102 Tahun 2023 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan disusunnya Dokumen RAT Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 adalah sebagai berikut

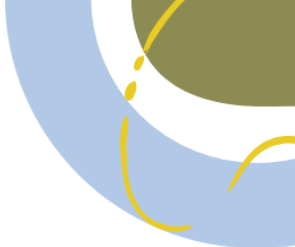
- 
- 
1. Memberikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dalam satu tahun kedepan;
  2. Sebagai salah satu referensi dalam penyusunan dokumen perencanaan penganggaran perangkat daerah berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan;
  3. Memberikan arah untuk pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan;
  4. Memberikan kebijakan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pasuruan;
  5. Menyusun kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan tahun berjalan per bidang/urusan serta target keberhasilan indikator penanggulangan kemiskinan beserta lokasi prioritas program;
  6. Melakukan penjabaran prioritas program yang tercantum dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen ini terdiri dari atas lima bab, sebagai berikut:

1. Bab pertama, tentang pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum dari penyusunan dokumen RAT Tahun 2025.
2. Bab kedua tentang. Evaluasi kinerja tahun sebelumnya yang menyajikan data dan deskripsi detail terkait dengan hasil capaian kemiskinan di Kabupaten Pasuruan yang meliputi garis kemiskinan, persentase penduduk miskin, kedalaman kemiskinan, keparahan kemiskinan, kemiskinan ekstrem dan dimensi lainnya yang berkaitan dengan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan.
3. Bab ketiga tentang kebijakan dan strategi tahun 2025, menjelaskan kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan serta arah kebijakan penanggulangan kemiskinan berdasarkan RAT Tahun 2025.
4. Bab keempat tentang matriks target keberhasilan dan lokus prioritas. Pada bagian ini, menyajikan target keberhasilan indikator utama penanggulangan kemiskinan, hasil analisis penentuan lokasi prioritas, serta matriks program dan target keberhasilan tahun 2025.

- 
- 
5. Bab kelima tentang penutup, menyajikan kesimpulan utama dari dokumen RAT penanggulangan kemiskinan tahun 2025.



## BAB II

### KONDISI KEMISKINAN KABUPATEN PASURUAN

#### 2.1 Perkembangan Kondisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar, karena kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan dan kemiskinan merupakan masalah global karena kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi banyak negara (Yacoub, 2012). Menurut (World Bank, 2004) salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (lack of income and assets) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (acceptable). Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (the poor) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai.

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Penduduk miskin oleh BPS didefinisikan sebagai ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi standar minimum kebutuhan dasar sebagai syarat berkehidupan secara layak di wilayah tempat tinggalnya. Kebutuhan untuk hidup layak tersebut diterjemahkan sebagai suatu jumlah rupiah yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi makanan setara 2100 kalori sehari, perumahan, pakaian, kesehatan, dan pendidikan. Jumlah rupiah tersebut kemudian disebut sebagai Garis Kemiskinan.

Dalam analisis kemiskinan dikenal beberapa indikator penting yang dapat dipergunakan untuk mengukur insiden kemiskinan. Indikator yang paling sering dipergunakan adalah head-count ratio (P0). Ukuran ini memberikan gambaran tentang proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Indikator ini mudah dihitung dan dipahami, namun demikian tidak dapat mengindikasikan seberapa parah/dalam tingkat kemiskinan yang terjadi, mengingat ukuran ini tetap tidak berubah jika seorang yang miskin menjadi lebih miskin. Oleh karena itu



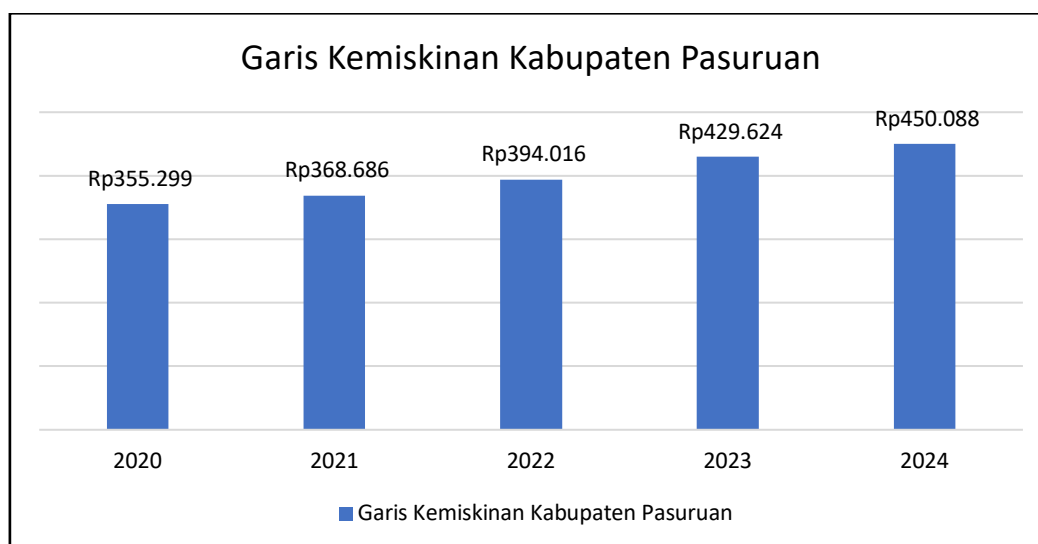
dikenal juga indikator kemiskinan yang lain, yaitu tingkat kedalaman kemiskinan/poverty gap index (P1) dan tingkat keparahan kemiskinan/poverty severity index (P2). Tingkat kedalaman kemiskinan/poverty gap index (P1) menjelaskan rata-rata jarak antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Namun demikian, indeks ini tidak sensitif terhadap distribusi pendapatan antara penduduk miskin, sehingga dibutuhkan indikator lain guna mengukur tingkat keparahan kemiskinan/poverty severity index (P2). Penurunan pada P1 mengidentifikasi adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Pasuruan merupakan tingkat kemiskinan dari 24 kecamatan, kecamatan, kelurahan dan desa. Indikator kinerja yang digunakan dalam bidang kemiskinan adalah garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan dan indeks gini. Penduduk yang masuk dalam kategori miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

### **2.1.1 Garis Kemiskinan**

Indikator yang digunakan dalam karakteristik masalah tingkat kemiskiaann adalah garis kemiskinan Garis kemiskinan (GK) dapat juga diartikan sebagai tingkat pendapatan atau pengeluaran yang ditetapkan, dimana bila pendapatan seseorang berada di bawah tingkatan tersebut, maka ia dikatakan miskin. Oleh karena itu, garis kemiskinan sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya angka kemiskinan. Semakin tinggi garis kemiskinan, akan semakin banyak masyarakat yang tergolong miskin. Secara metodologi, GK dibentuk berdasarkan penjumlahan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GNKM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Sedangkan GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan Kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Sementara paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan atau 47 jenis komoditi di pedesaan.

Perubahan GK dipengaruhi oleh pergerakan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kabupaten Pasuruan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Perubahan GK ini selain dipengaruhi oleh inflasi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika pola konsumsi di kalangan penduduk yang disajikan sebagai referensi dalam pengukuran seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan oleh rata-rata penduduk Kabupaten Pasuruan dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum yang disetarakan dengan kecukupan kalori 2.100 kilo kalori perkapita per hari dan pemenuhan kebutuhan dasar non makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2024, Garis Kemiskinan di Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:



**Gambar 2. 1 Garis Kemiskinan Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024**

Sumber: Kabupaten Pasuruan dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan grafik diatas, garis kemiskinan kabupaten Pasuruan terus mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Hal ini menandakan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Pasuruan. Rata rata peningkatan dari tahun 2020-2024 adalah sebesar 3,7%. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2022 ke tahun 2023 dimana capaian tahun 2022 adalah Rp. 395.016, kemudian meningkat di tahun 2023 menjadi 429.624. peningkatan ini menjagi parameter Kabupaten Pasuruan sudah memiliki daya beli yang baik.

### 2.1.2 Jumlah Penduduk Miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan diantaranya adanya program-program nasional seperti PKH, bantuan pangan non tunai, beasiswa untuk siswa miskin dan program Pemerintah Kabupaten Pasuruan antara lain bantuan Operasional Pendidikan ke masyarakat. Bantuan Operasional bertujuan menekan beban pengeluaran non konsumsi rumah tangga di tengah-tengah masyarakat, meningkatkan pendapatan, pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, pengembangan usaha kecil dan mikro, dan sinergitas serta peningkatan kerjasama penanganan lintas sektor, keterlibatan swasta, perguruan tinggi, perbankan dan unsur masyarakat.

Secara umum pada September 2020 – September 2024, tingkat kemiskinan di Kabupaten Pasuruan mengalami fluktuatif, terkecuali pada 202 sampai 2021. Kenaikan jumlah penduduk miskin pada periode tersebut dipucu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Selain itu, kenaikan jumlah penduduk miskin pada periode tersebut disebabkan oleh adanya pandemic Covid-19. Adapun perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Pasuruan Maret 2020 – Maret 2024 adalah sebagai berikut:



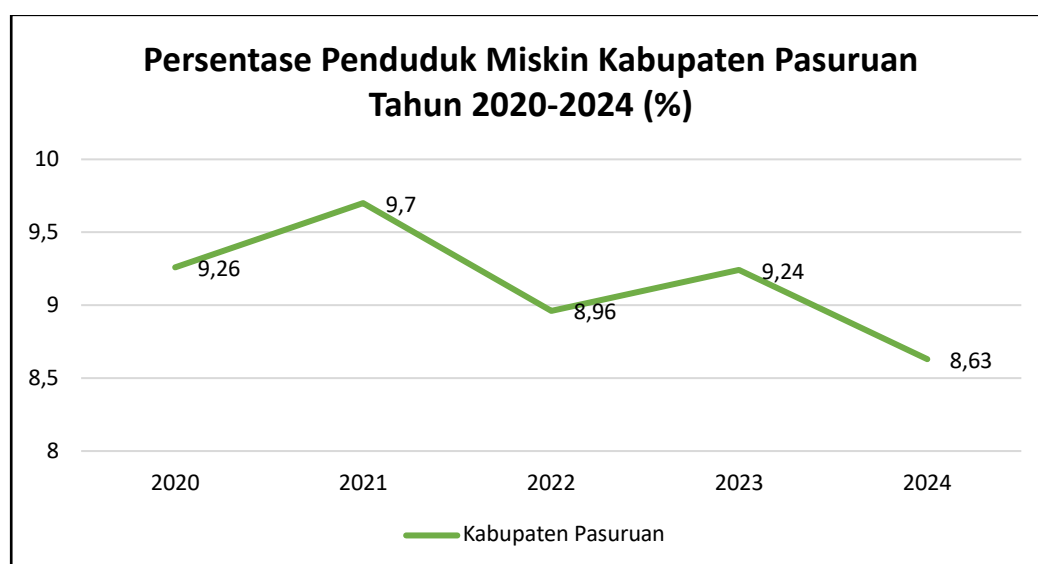
**Gambar 2. 2 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024**

Sumber: Kabupaten Pasuruan dalam Angka, 2025

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2020 sampai tahun 2024 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pasuruan mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020, capaian jumlah penduduk miskin sebesar 151,43. Kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 159,78. Namun pada tahun 2022 capaian jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 11,16 ribu jiwa, dari 159,78 ribu jiwa pada Maret 2021 menjadi 148,62 ribu jiwa pada Maret 2022 atau mengalami penurunan sebesar 6,98 %. Kemudian pada tahun 2023 kembali mengalami kenaikan menjadi 154,09. Berdasarkan data tersebut dapat dianalisis bahwa penurunan penduduk miskin memberi arti bahwa pengurangan penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita lebih rendah dari garis kemiskinan sedangkan peningkatan penduduk miskin memberi arti bahwa peningkatan penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita lebih rendah dari garis kemiskinan. Namun pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 144,84.

### 2.1.3 Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin berasal dari jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dibandingkan dengan keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan. Adapun capaian persentase pendudukan miskin Nasional, Jawa Timur dan Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:



**Gambar 2. 3 Kemiskinan Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024**

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025*



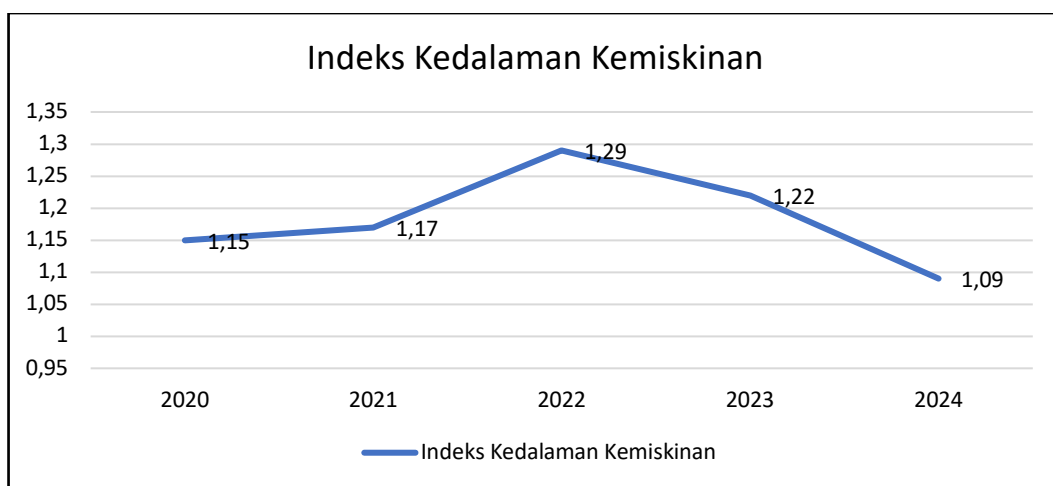
Secara umum kondisi kemiskinan di Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan. Namun demikian pada tahun 2023, Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan dikarenakan adanya inflasi yang menyebabkan daya beli masyarakat menjadi rendah. Berdasarkan gambar diatas capaian Persentase penduduk Miskin Kabupaten Pasuruan tahun 2023 mencapai 9,24%, atau 154.09 ribu jiwa lebih tinggi dari capaian tahun 2022 yang mencapai 8,96% atau 148.62 ribu jiwa. Peningkatan ini dikarenakan adanya peningkatan garis kemiskinan kemudian tidak diimbangi dengan pengeluaran masyarakat tiap bulan sehingga menjadi penyebab meningkatnya persentase dan jumlah penduduk miskin. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengurangi kemiskinan antara lain dengan menurunkan beban pengeluaran melalui perlindungan sosial dan meningkatkan pendapatan melalui produktivitas dan inklusi keuangan. Berdasarkan Upaya tersebut capaian Kemiskinan Kabupaten Pasuruan tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 8,64.

#### **2.1.4 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)**

Penanggulangan kemiskinan bukan hanya menargetkan penurunan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin tetapi yang terpenting adalah bagaimana mengatasi kedalaman kemiskinan di Kabupaten Pasuruan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index/P1) adalah Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Nilai agregat dari poverty gap index menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai poverty gap index, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit (BPS, 2018).

Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Nilai agregat dari indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan biaya mengetaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk

miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil biaya indeks kedalaman kemiskinan, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasa kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program. Penurunan nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan merupakan ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.



**Gambar 2. 4 Indeks Kedalamanm Kemiskinan (P1)  
di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024**

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025*

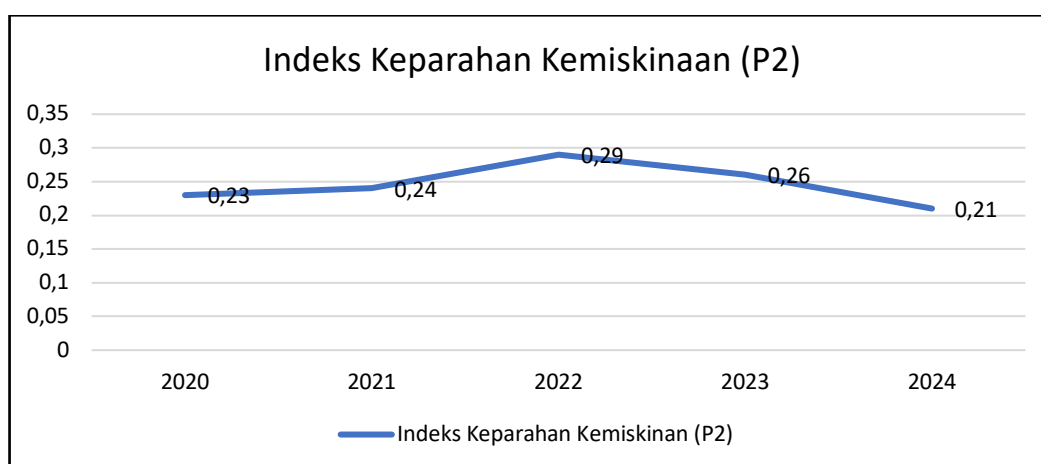
Berdasarkan gambar diatas indeks kedalaman kemiskinan mengalami fluktuasi namun cenderung penurunan. Penurunan nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan merupakan ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

#### **2.1.5 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)**

Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index/P2) adalah ndeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Memberikan informasi yang saling melengkapi pada

insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (poverty gap) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin (BPS, 2018).

Indeks keparahan kemiskinan adalah indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin serta memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Adapun data Indeks Keparahkan Kemiskinaan (P2) Kabupaten Pasuruan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut:



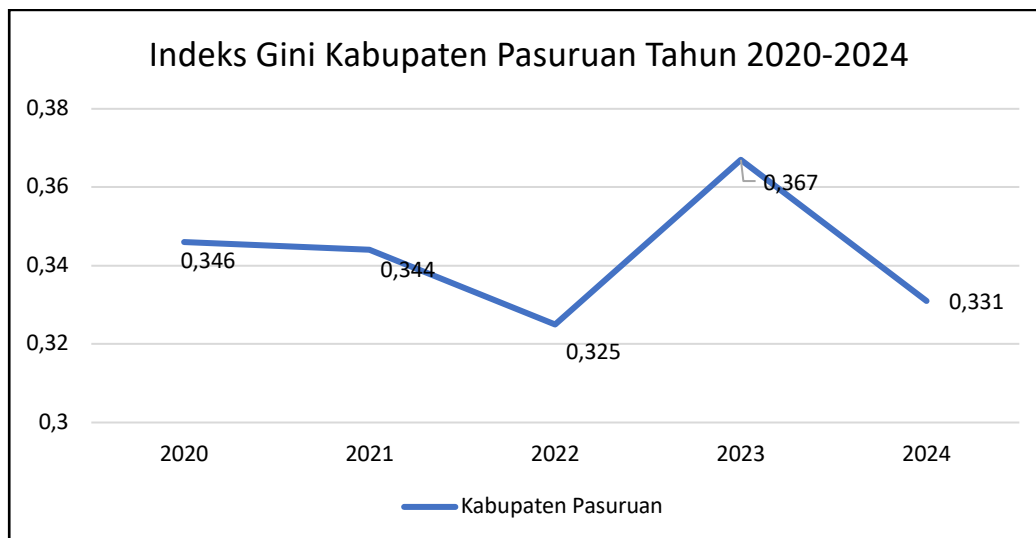
**Gambar 2. 5 Perkembangan Indeks Keparahkan Kemiskinaan (P2) di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024**

Sumber: Kabupaten Pasuruan dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa perkembangan indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Pasuruan tahun 2020-2024 mengalami penurunan. Penurunan indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin yang menurun.

#### 2.1.6 Indeks Gini (Kesenjangan Pendapatan)

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan antar kelompok pendapatan masyarakat suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi.



**Gambar 2. 6 Indeks Gini Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024**

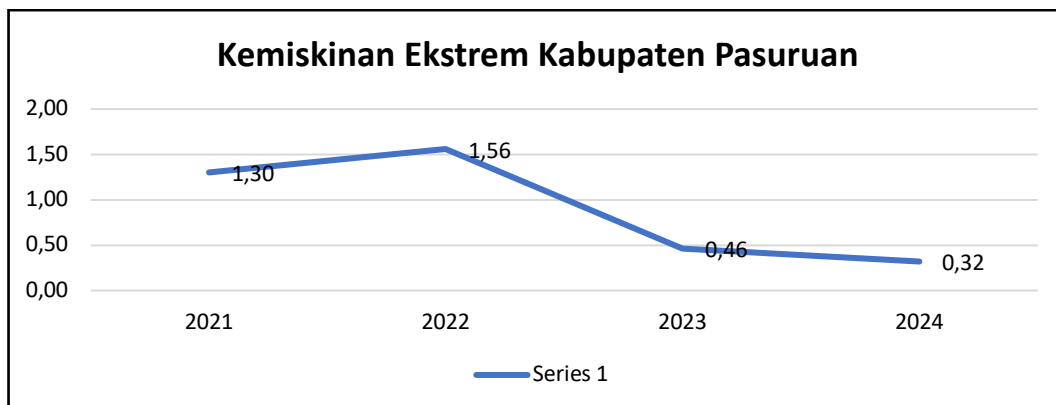
*Sumber: Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025*

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa secara umum indeks gini Kabupaten Pasuruan dalam periode tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi dan termasuk dalam kategori moderat/sedang (berada pada interval 0,3 – 0,5). Paruh periode pertama mengalami kenaikan, namun paruh periode berikutnya menunjukkan penurunan atau kondisi yang lebih baik. Dalam konteks kewilayahan, indeks gini Kabupaten Pasuruan berada di bawah atau lebih baik dari pada angka Jawa Timur dan Nasional. Kondisi ini dikarenakan Indeks Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh antar penduduk. Indeks gini didapatkan dari perhitungan antara pendapatan masyarakat dengan nilai pengeluaran konsumsi penduduk.

### **2.1.7 Kemiskinan Ekstrem**

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem atau setara dengan USD 1.9 PPP (*purchasing power parity*). Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan "*absolute poverty measure*" yang konsisten antar negara dan antar waktu. Dengan kata lain adalah "Masyarakat yang memiliki pengeluaran perkapita per hari di bawah US \$ 1.9 PPP". PPP ditentukan menggunakan "*absolute poverty measure*" yang konsisten antar negara dan antar waktu. Sehingga misalnya dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), memiliki kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya setara atau di bawah Rp. 1.288.680 per keluarga per

bulan. Adapun capaian persentase penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:



**Gambar 2. 7 Perkembangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024**

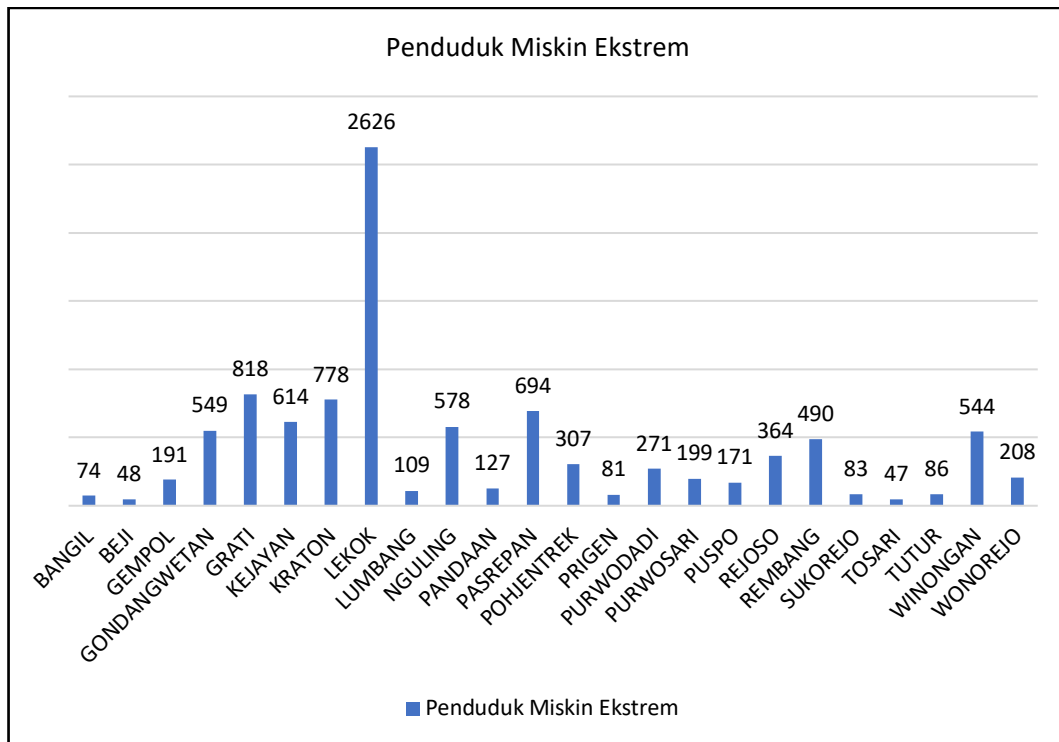
Sumber: Diolah

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa perkembangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2021 capaian kemiskinan ekstrem mencapai 1,30 atau setara dengan 21.49 ribu jiwa, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2022 mencapai 1,56 atau sebanyak 25,79 ribu jiwa yang setelah dilakukan verifikasi dan validasi jumlahnya adalah sebanyak 27 ribu. Namun pada tahun 2023 dan tahun 2024 capaian kemiskinan ekstrem Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan menjadi 0,46 ke 0,32 atau sebanyak 10.057 jiwa. Kemiskinan ekstrem menggambarkan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan social.

#### **1) Jumlah Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Pasuruan**

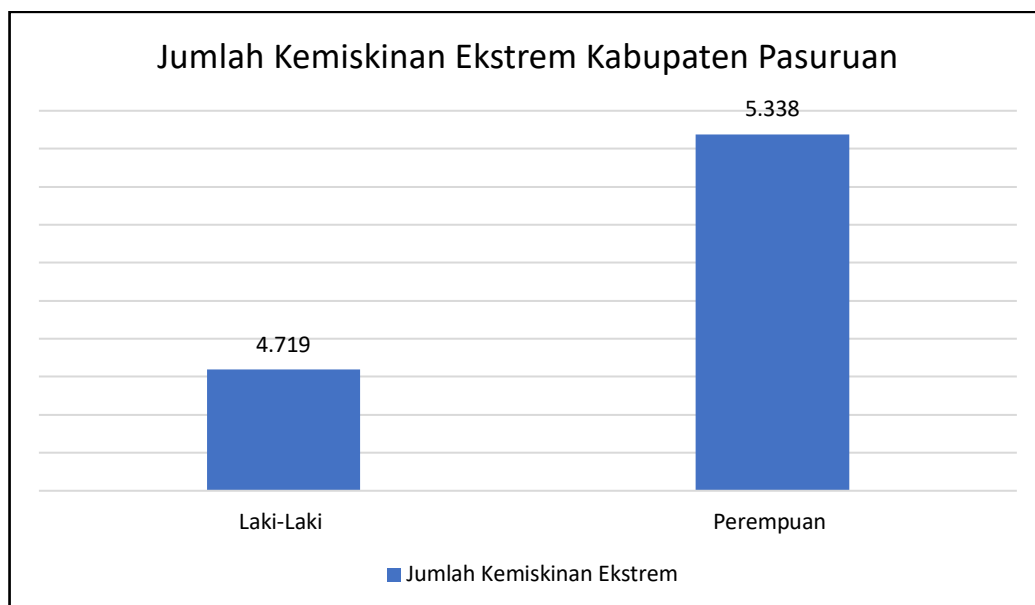
Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial (PBB, 1996).

Jumlah penduduk miskin ekstrem percentil 1 dan 2 Kabupaten Pasuruan tahun 2024 sebanyak 10.057 jiwa. Adapun data sebaran kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:



**Gambar 2. 8 Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten Pasuruan Tahun 2024**  
Sumber: P3KE

Adapun jumlah penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Pasuruan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

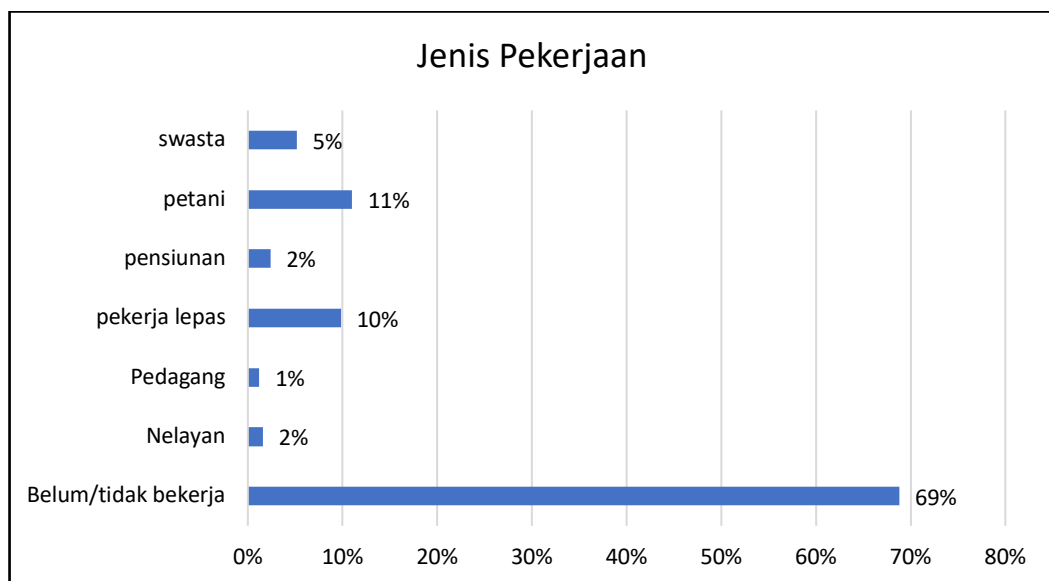


**Gambar 2. 9 Jumlah Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Pasuruan**  
Sumber: Kemenko PMK Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin ekstrem kabupaten Pasuruan adalah sebanyak 10.057 dengan rincian laki laki sebanyak 4.719 dan perempuan sebanyak 5.338. Capaian tersebut menunjukkan jumlah miskin ekstrem perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Hal ini menggambarkan adanya kesenjangan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan social.

## 2) Individu berdasarkan Jenis Pekerjaan

Berdasarkan gambar berikut menunjukkan individu berdasarkan jenis pekerjaan. Adapun indicator yang dilihat dari jenis pekerjaan adalah nelayan, pedagang, pegawai swasta, pegawai lepas, pensiunan, petani, tidak bekerja, wiraswasta, dan lainnya. Adapun gambaran jenis pekerjaan miskin ekstrem di Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:



**Gambar 2. 10 Persentase Kemiskinan Ekstrem berdasarkan Jenis Pekerjaan**

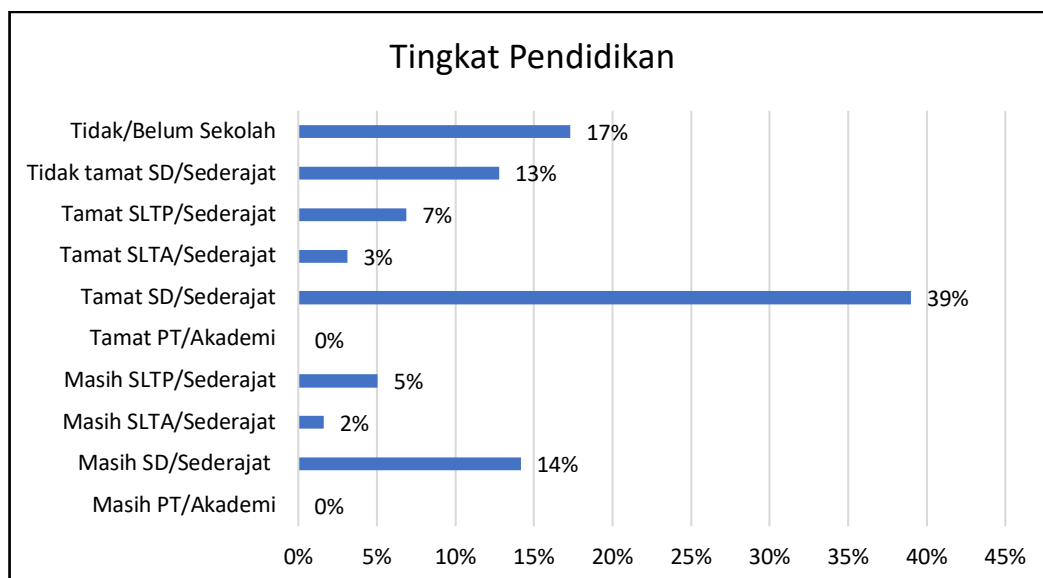
Sumber: P3KE, diolah

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa terdapat ketimpangan yang tinggi antara penduduk yang tidak bekerja dengan penduduk yang bekerja di berbagai jenis pekerjaan. Penduduk kemiskinan ekstrem yang tidak bekerja mencapai 69% dari total penduduk kemiskinan ekstrem atau

sejumlah 6.919 jiwa. Capaian ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah untuk memberikan program membuka lapangan pekerjaan agar dapat menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Pasuruan.

### 3) Individu berdasarkan tingkat Pendidikan

Berdasarkan gambar berikut menunjukkan individu berdasarkan tingkat Pendidikan. Adapun indicator tingkat Pendidikan yang dilihat dalam dokumen P3KE adalah Belum Tamat SD/Sederajat, Siswa SD/Sederajat, Tamat SD/Sederajat, Tidak Tamat SD/Sederajat, Siswa SMP/Sederajat, Tamat SMP/Sederajat, Siswa SMA/Sederajat, Tamat SMA/Sederajat, Mahasiswa Perguruan Tinggi, Tamat Perguruan Tinggi, dan Tidak/belum sekolah. Adapun capaian individu kemiskinan ekstrem berdasarkan tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut:



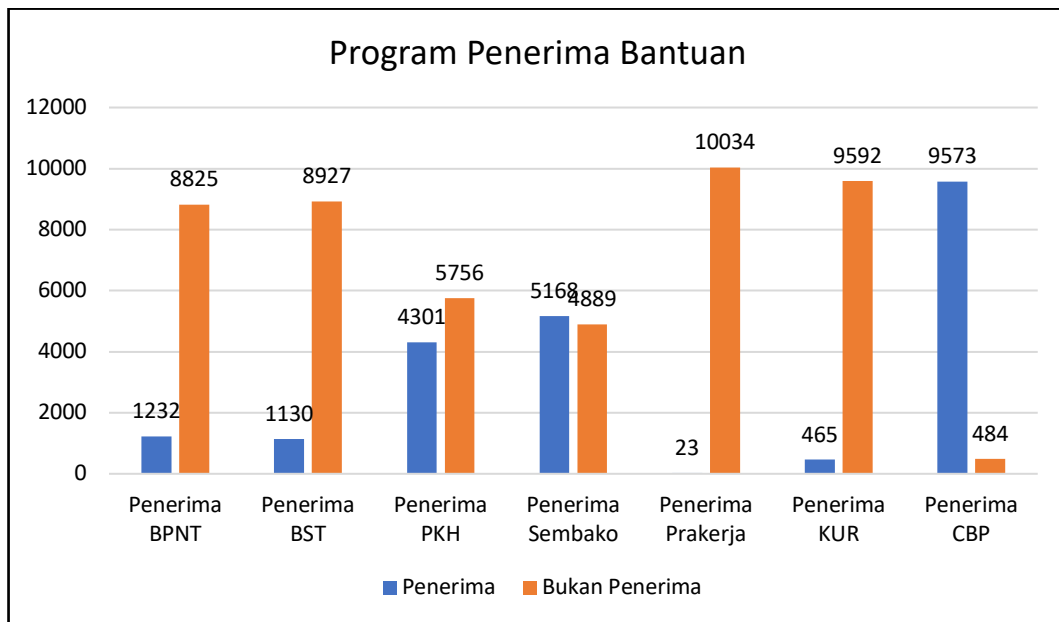
**Gambar 2. 11 Individu Kemiskiaann Ekstrem Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Sumber: P3KE, diolah

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa tingkat Pendidikan tertinggi bagi penduduk miskin ekstem di Kabupaten Pasuruan adalah tamat SD/Sederajat dengan persentase 39% atau sejumlah 3.923 jiwa. kemudian yang kedua adalah tidak/belum sekolah dengan persentase 17%, kemudian siswa SD/Sederajat dengan persentase 14% dan Tidak tamat SD/Sederajat 13%. Selebihnya indicator tingkat Pendidikan lainnya berada di bawah 10%.

#### 4) Individu Penerima Bantuan

Berdasarkan gambar berikut menunjukkan individu berdasarkan penerima bantuan baik dari Penerima BPNT, Penerima BST, Penerima PKH, Penerima KUR, Penerima CBP, Penerima Sembako, dan Penerima Prakerja. Adapun capaian individu penerima bantuan di Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut



**Gambar 2. 12 Persentase Penduduk Miskin Ekstrem berdasarkan Kepemilikan Tempat Tinggal**

Sumber: P3KE, diolah

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Pasuruan bukan penerima bantuan. Dari 7 indikator Program Bantuan, terhadap 6 Indikator yang didominasi oleh bukan penerima. Dengan demikian dapat dilihat bahwa program bantuan yang diberikan oleh Pemerintah belum mensasar individu kemiskinan ekstrem.

## 2.2 Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu urusan wajib yang menjadi concern Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan. Pendidikan bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, melainkan juga masyarakat dan keluarga. Pendidikan sejak usia dini mutlak diperlukan, dalam rangka menciptakan generasi penerus bangsa yang lebih baik. Keluarga sebagai lingkungan terkecil

masyarakat, mempunyai peranan penting dalam membentuk karakter bangsa. Setiap individu berhak untuk memperoleh pendidikan secara formal maupun nonformal. Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pelatihan keterampilan, forum diskusi, kehidupan sosial kemasyarakatan, merupakan pendidikan informal yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Dewasa ini lembaga pendidikan nonformal banyak bermunculan, dalam rangka upaya memperkaya dan menambah pengetahuan dan keterampilan.

### 2.2.1 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah atau *mean years school* adalah rata-rata lama belajar siswa sampai lulus sekolah pada suatu jenjang pendidikan dan dinyatakan dalam tahun. Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Asumsi yang berlaku secara umum bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kualitas seseorang, baik pola pikir maupun pola tindakannya. Adapun capaian angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pasuruan tahun 2020-2024 dapat dilihat dalam gambar berikut:



**Gambar 2. 13 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

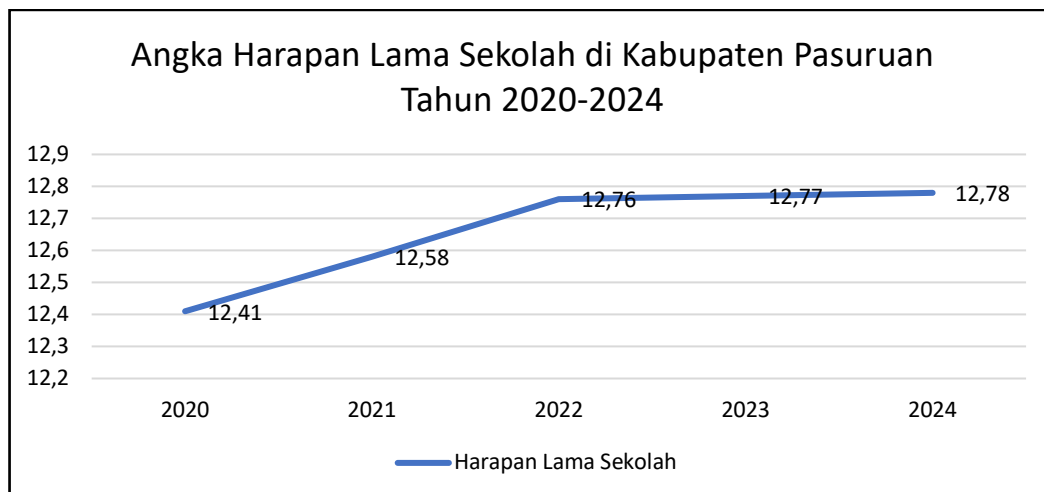


Selama periode lima tahun terakhir angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pasuruan menunjukkan peningkatan meskipun tidak signifikan. Rata-rata penduduk Kabupaten Pasuruan usia 25 tahun ke atas sebagian besar telah menempuh pendidikan hingga kelas VII (SMP kelas I). Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 telah melalui target tapi masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan sesuai yang diharapkan. Kondisi tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain : (1) Pemulihan ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya stabil; (2) Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan yang masih rendah terutama pada penduduk usai 18 tahun keatas yang tidak bersedia memulai atau melanjutkan pendidikan lewat jalur kesetaraan, (3) Data kependudukan yang belum update turut memberikan bagian dari rendahnya data pendidikan penduduk Kabupaten Pasuruan, (4) Gerakan Kembali Belajar yang dicanangkan oleh Dinas Pendidikan sebagai bagian dari usaha meningkatkan Rata Lama Sekolah dalam tahapan-tahapan proses yang masih dilakukan.

Pendidikan (formal dan non formal) bisa berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang, baik secara tidak langsung melalui perbaikan produktivitas dan efisiensi secara umum, maupun secara langsung melalui pelatihan golongan miskin dengan ketrampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan mereka (Lincoln, 1999). Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas seseorang. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan mempekerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang lebih tinggi, sehingga perusahaan akan bersedia memberikan upah/gaji yang lebih tinggi kepada yang bersangkutan. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang dapat diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya.

### **2.2.2 Harapan Lama Sekolah (HLS)**

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan diperoleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Adapun capaian Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2023 sebagaimana gambar berikut:



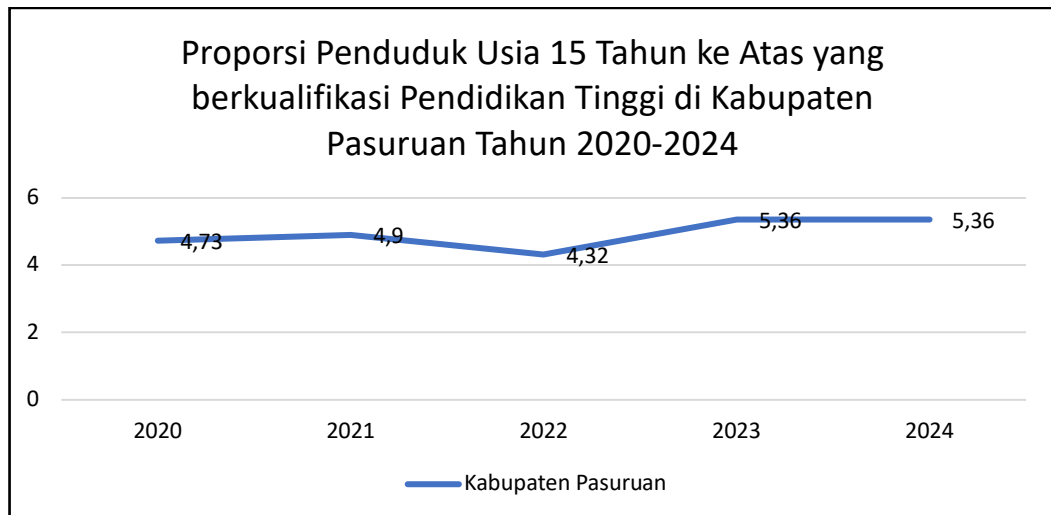
**Gambar 2. 14 Harapan Sekolah di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Selama periode 2020-2024, harapan lama sekolah di Kabupaten Pasuruan mengalami rata-rata peningkatan sebesar 0,92% per tahun. Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2024, harapan lama sekolah di Kabupaten Pasuruan telah mencapai 12,78 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA/Sederajat. Capaian yang tidak terlalu signifikan tersebut diakibatkan masih adanya hambatan sarana prasarana pendukung proses pembelajaran yang belum merata dan maksimal serta Angka Putus Sekolah yang masih relatif tinggi. Selain itu pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan juga menjadi kendala tersendiri.

### **2.2.3 Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi**

Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100% (seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di provinsi tersebut sudah menyelesaikan pendidikan tinggi). Jenjang pendidikan tinggi mencakup: Diploma I-IV, S1, S2, S2 Terapan, S3. Adapun data proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi di Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut.



**Gambar 2. 15 Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, Tahun 2025

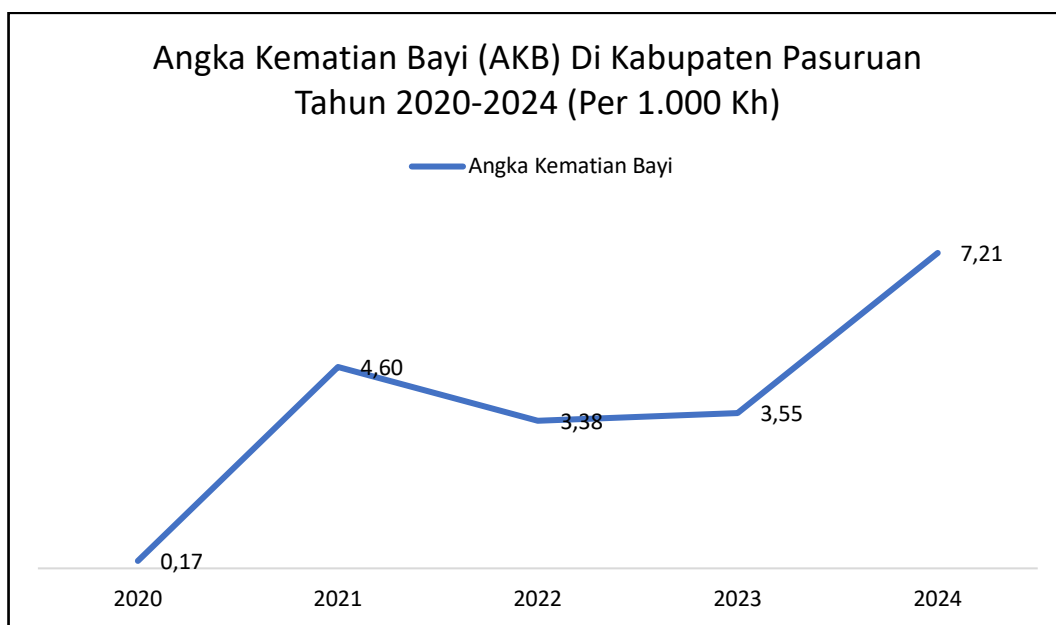
Berdasarkan gambar 2.25-a angka proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi mengalami peningkatan pada tahun periode 2020-2024 meskipun masih tergolong rendah. Hal ini menjadi atensi untuk meningkatkan angka proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi. Tingkat pendidikan yang dapat ditamatkan oleh seseorang bisa mencerminkan tingkat intelektualitas orang tersebut dan juga dapat meningkatkan status sosial dimasyarakat. Oleh karenanya makin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan oleh seseorang maka kemampuan, wawasan, cara berfikir akan lebih luas dan maju.

## 2.3 Kesehatan

### 2.3.1 Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator yang sangat penting untuk mengukur keberhasilan program berbagai penyebab kematian maupun program kesehatan ibu dan anak sebab angka kematian bayi ini berkaitan erat dengan tingkat kesehatan ibu dan anak. Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Target Angka kematian ibu (AKI) berdasarkan SDGs (Sustainable Development Goals) harus di bawah 70 per 100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2030.

Indikator Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup digunakan untuk mengukur jumlah bayi (usia kurang dari satu tahun) yang meninggal per 1.000 kelahiran hidup dalam tahun yang sama, sehingga indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah bayi (usia kurang dari satu tahun) yang meninggal per 1.000 kelahiran hidup dibagi jumlah kelahiran hidup dikalikan seribu. Perkembangan angka kematian bayi selama lima tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif. Adapun capaian angka kematian bayi di Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:



**Gambar 2. 16 Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Pasuruan**  
*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2025*

Kematian bayi terbanyak karena Infeksi disebabkan Ibu Bersalin banyak yang mengalami KPD (Ketuban Pecah Dini). Asfiksia disebabkan bayi tidak mendapatkan penanganan Asfiksia oleh Bidan dengan baik sesuai dengan kompetensi, dan BBLR disebabkan karena Ibu Hamil KEK dan PEB. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kompetensi pada Bidan dan juga komunikasi secara intens dengan dokter spesialis anak yang keberadaannya pada RSUD Bangil dan RSUD Grati. Tujuan adanya jejaring antara Puskesmas, Polindes dan Bidan Praktek dengan RSUD Bangil dan RSUD Grati agar bayi Infeksi, Asfiksia bisa tertangani dengan baik sebelum dirujuk ke RSUD Bangil atau RSUD Grati. Kasus BBLR bisa terpantau dan ditingkatkan berat badan bayi apabila pemeriksaan kehamilan dilakukan secara rutin dan berkualitas, serta ibu hamil selalu mendapatkan penyuluhan.

Bila dilihat dari cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sebanyak 100%, maka pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan masih perlu ditingkatkan kualitas pertolongan persalinan tersebut serta penanganan gawat darurat bayi oleh Bidan dan sistem rujukan yang baik dengan Puskesmas, Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) dan RSUD. Namun demikian ternyata bayi yang mengalami kematian tersebut telah mengalami proses rujukan ke Rumah Sakit. Upaya yang dilakukan untuk menekan angka kematian bayi di Kabupaten Pasuruan diantaranya adalah pelaksanaan Penelusuran Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (P-PWS KIA), Audit Maternal Perinatal, Supervisi Fasilitatif, Peningkatan pemeriksaan ibu hamil melalui revitalisasi posyandu serta penyelenggaraan pelatihan untuk tenaga medis meliputi Pelatihan Asuhan Persalinan Normal, Pelatihan Kelas Ibu Hamil, Pelatihan Kelas Ibu Balita, Sarasehan dalam rangka upaya penurunan Angka Kematian Bayi.

Adapun upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan posyandu. Pengembangan posyandu sangat penting dalam rangka pembangunan Kesehatan masyarakat, melalui partisipasi masyarakat dalam posyandu terdapat pos penimbangan, pelayanan gizi dan makanan tambahan. Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Capaian Posyandu aktif di Kabupaten Pasuruan mencapai 87,8% mengalami peningkatan sebesar 12,9%. Capaian tersebut menggambarkan adanya optimalisasi status Posyandu sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengembangkan kualitas Posyandu menjadi penentu utama kemampuan posyandu partisipatif, hal ini dinilai berdasarkan kepesertaan ibu balita dalam kegiatan Posyandu, karena tokoh utama posyandu adalah ibu balita.

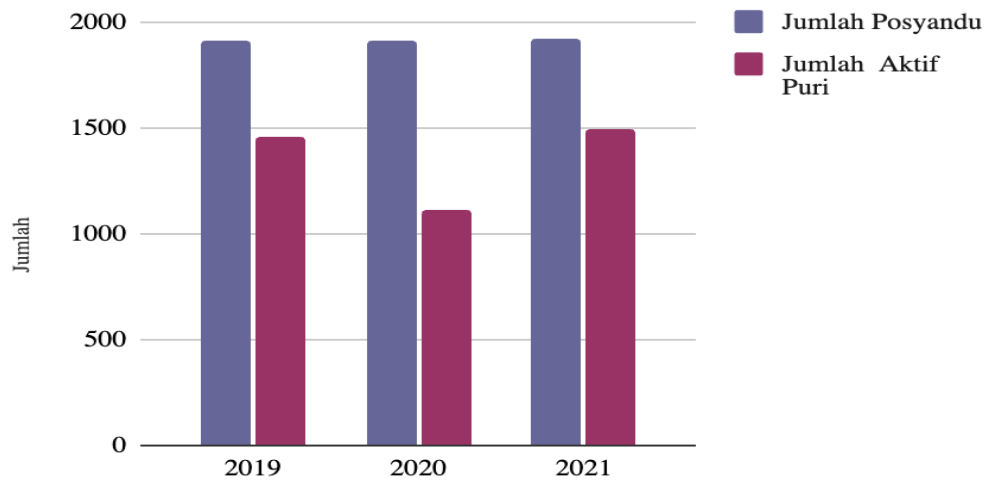
**Tabel 2. 1 Posyandu Aktif di Kabupaten Pasuruan**

| No | Puskesmas   | Jumlah | Strata  |       |         |         | Posyandu Aktif Puri | % Aktif |
|----|-------------|--------|---------|-------|---------|---------|---------------------|---------|
|    |             |        | Pratama | Madya | Purnama | Mandiri |                     |         |
| 1  | Purwodadi   | 69     | 0       | 6     | 63      | 0       | 63                  | 91,30%  |
| 2  | Nongkojajar | 43     | 0       | 18    | 25      | 0       | 25                  | 58,14%  |
| 3  | Sumberpitu  | 22     | 0       | 1     | 21      | 0       | 21                  | 95,45%  |

| No | Puskesmas      | Jumlah | Strata  |        |         |         | Posyandu Aktif Puri | % Aktif |
|----|----------------|--------|---------|--------|---------|---------|---------------------|---------|
|    |                |        | Pratama | Madya  | Purnama | Mandiri |                     |         |
| 4  | Puspo          | 36     | 0       | 3      | 33      | 0       | 33                  | 91,67%  |
| 5  | Tosari         | 26     | 0       | 2      | 24      | 0       | 24                  | 92,31%  |
| 6  | Lumbang        | 36     | 0       | 17     | 19      | 0       | 19                  | 52,78%  |
| 7  | Pasrepan       | 72     | 0       | 5      | 47      | 20      | 67                  | 93,06%  |
| 8  | Kejayan        | 72     | 0       | 0      | 71      | 1       | 72                  | 100,00% |
| 9  | Ambal-Ambil    | 48     | 0       | 16     | 32      | 0       | 32                  | 66,67%  |
| 10 | Wonorejo       | 88     | 0       | 3      | 84      | 1       | 85                  | 96,59%  |
| 11 | Purwosari      | 65     | 0       | 3      | 62      | 0       | 62                  | 95,38%  |
| 12 | Karangrejo     | 17     | 0       | 0      | 17      | 0       | 17                  | 100,00% |
| 13 | Prigen         | 53     | 0       | 0      | 53      | 0       | 53                  | 100,00% |
| 14 | Bulukandang    | 28     | 0       | 0      | 28      | 0       | 28                  | 100,00% |
| 15 | Sukorejo       | 89     | 0       | 20     | 67      | 2       | 69                  | 77,53%  |
| 16 | Pandaan        | 89     | 0       | 14     | 57      | 18      | 75                  | 84,27%  |
| 17 | Sebani         | 33     | 0       | 0      | 33      | 0       | 33                  | 100,00% |
| 18 | Gempol         | 87     | 0       | 2      | 79      | 6       | 85                  | 97,70%  |
| 19 | Kepulungan     | 44     | 0       | 12     | 31      | 1       | 32                  | 72,73%  |
| 20 | Beji           | 101    | 0       | 2      | 95      | 4       | 99                  | 98,02%  |
| 21 | Bangil         | 44     | 0       | 2      | 42      | 0       | 42                  | 95,45%  |
| 22 | Raci           | 39     | 0       | 2      | 32      | 5       | 37                  | 94,87%  |
| 23 | Rembang        | 76     | 0       | 4      | 70      | 2       | 72                  | 94,74%  |
| 24 | Kraton         | 65     | 0       | 14     | 51      | 0       | 51                  | 78,46%  |
| 25 | Ngempit        | 58     | 0       | 8      | 50      | 0       | 50                  | 86,21%  |
| 26 | Pohjentrek     | 41     | 0       | 2      | 37      | 2       | 39                  | 95,12%  |
| 27 | Gondang Wetan  | 96     | 0       | 11     | 85      | 0       | 85                  | 88,54%  |
| 28 | Rejoso         | 66     | 0       | 5      | 56      | 5       | 61                  | 92,42%  |
| 29 | Winongan       | 86     | 0       | 20     | 50      | 16      | 66                  | 76,74%  |
| 30 | Grati          | 50     | 0       | 5      | 45      | 0       | 45                  | 90,00%  |
| 31 | Kedawung Wetan | 28     | 0       | 0      | 24      | 4       | 28                  | 100,00% |
| 32 | Lekok          | 92     | 0       | 22     | 61      | 9       | 70                  | 76,09%  |
| 33 | Nguling        | 62     | 0       | 16     | 46      | 0       | 46                  | 74,19%  |
|    | Jumlah         | 1921   | 0       | 235    | 1590    | 96      | 1686                | 87,77%  |
|    |                |        | 0,00%   | 12,23% | 82,77%  | 5,00%   |                     |         |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan

#### PERKEMBANGAN STRATA POSYANDU BALITA PURI 3 TAHUN TERAKHIR

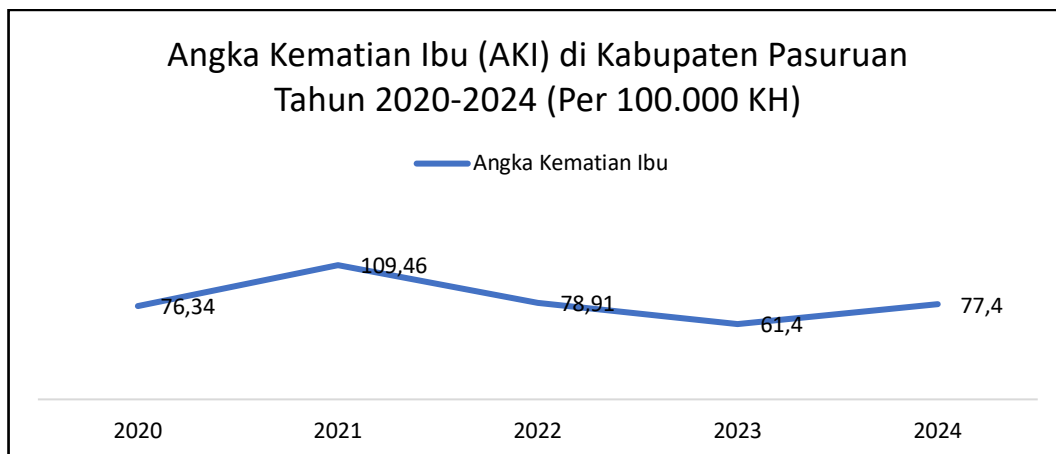


**Gambar 2. 17 Perkembangan Strata Posyandu Balita Puri 3 Tahun Terakhir**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan

#### 2.3.2 Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu melahirkan digunakan untuk mengetahui keselamatan ibu pada proses persalinan. Indikator ini diperoleh dengan perhitungan jumlah kematian ibu dalam satu tahun dibanding dengan jumlah kelahiran hidup dikalikan 100.000. Angka pengukuran resiko kematian wanita yang berkaitan dengan peristiwa kehamilan. Kematian ibu adalah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apa pun yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan akibat kecelakaan. Angka Kematian Ibu (AKI) atau Maternal Mortality Rate (MMR) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas. Target Angka kematian ibu (AKI) berdasarkan SDGs (Sustainable Development Goals) harus di bawah 70 per 100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2030. Adapun data capaian AKI di Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:



**Gambar 2. 18 Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Pasuruan**

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2025*

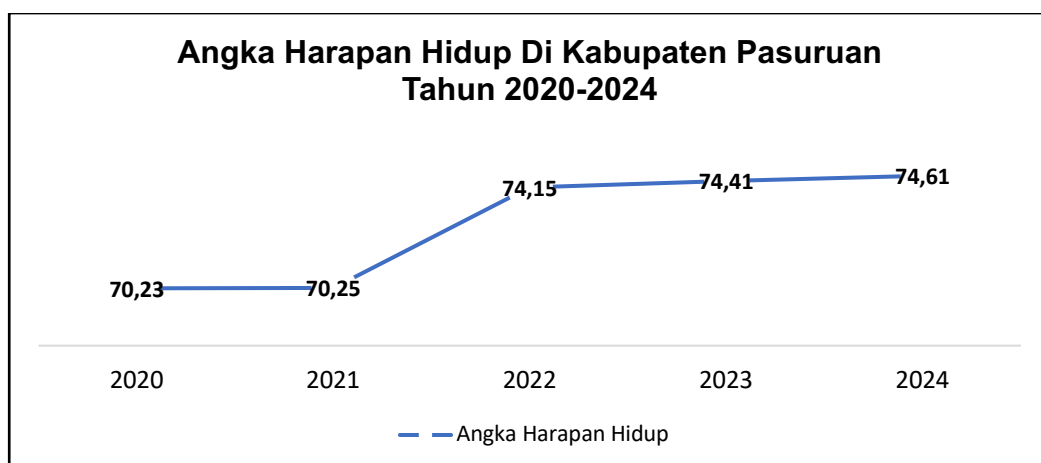
Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Pasuruan selama kurun waktu tahun 2020 sampai 2024 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2021, AKI mengalami kenaikan yang sangat signifikan karena adanya Pandemi Covid-19, selanjutnya tahun 2022-2023 mengalami penurunan. Pada tahun 2024 angka kematian ibu kembali meningkat sehingga perlu upaya yang telah dilakukan dan akan terus ditingkatkan yakni:

1. Meningkatkan kualitas pemeriksaan kehamilan (ANC/ Ante Natal Care) pada ibu hamil secara kontinyu yang dilakukan oleh tenaga kesehatan (Bidan);
2. Meningkatkan koordinasi melalui peningkatan sistem jejaring tenaga medis, sehingga pertolongan pada ibu hamil yang resiko tinggi dapat dilakukan sejak awal;
3. Membuat SIP (sistem informasi posyandu);
4. Meningkatkan pola rujukan kasus dan rujukan berjenjang sehingga tidak terjadi keterlambatan penanganan dan keterlambatan mengirim pasien;
5. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan bayi yakni:
  - a) Gerakan Ibu Hamil sadar Posyandu
  - b) Pembinaan Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) oleh Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)
  - c) Pertemuan kader KIBBLA
  - d) Audit Maternal Perinatal

- e) Pengembangan P4K di desa maslahat
- f) Penelusuran Pemantauan Wilayah Setempat KIA (P-PWS KIA) ibu dan anak
- g) Supervisi fasilitatif
- h) Pelatihan APN
- i) Pelatihan Kelas ibu hamil
- j) Kemitraan Bidan dan dukun bayi – kader (melalui PERDA nomor 2 tahun 2009 tentang KIBBLA)
- k) Peningkatan pemeriksaan ibu hamil melalui revitalisasi posyandu
- l) Drill emergency kegawatdaruratan Maternal disetiap Puskesmas
- m) Meningkatkan kerjasama sistem rujukan Kesehatan
- n) Menambah fasilitas RS Rujukan (RSUD Grati) di Wilayah Timur.

### 2.3.3 Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH), dijadikan indikator dalam mengukur kesehatan suatu individu di suatu daerah. AHH adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup. AHH diartikan sebagai umur yang mungkin dicapai seseorang yang lahir pada tahun tertentu. Angka harapan hidup dihitung menggunakan pendekatan tak langsung (indirect estimation). Data AHH Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan. Berdasarkan perhitungan Hasil Long Form SP2020, Angka Harapan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2022-2023 cenderung meningkat sebagaimana gambar berikut:



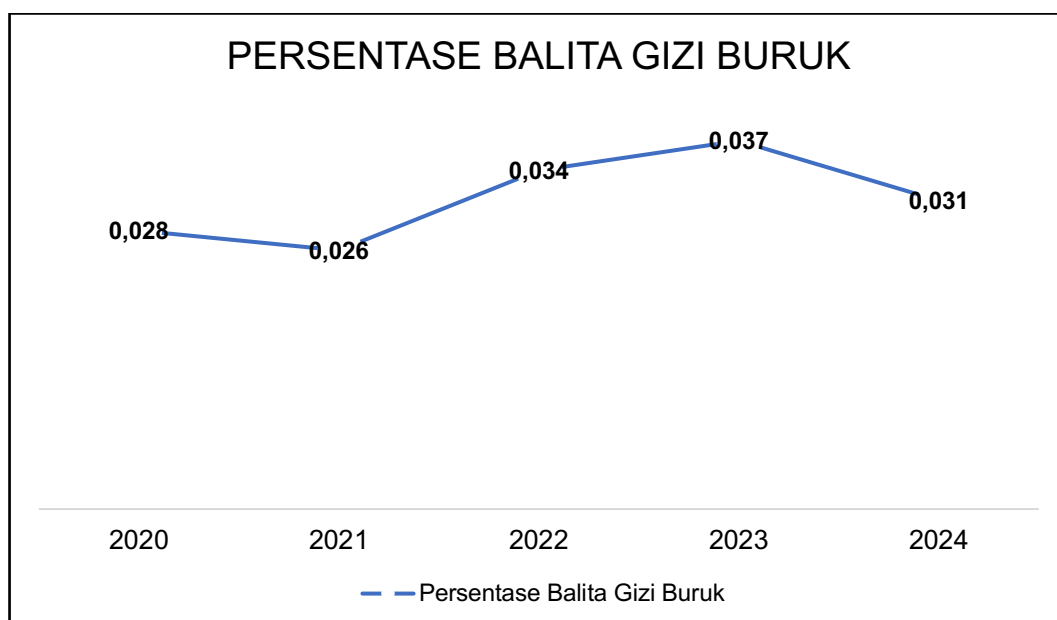
**Gambar 2. 19 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Pasuruan cenderung mengalami peningkatan selama periode lima tahun. Hal ini menunjukkan peningkatan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2024, rata-rata umur harapan hidup tumbuh sebesar 0,16% per tahun. Peningkatan Angka Harapan Hidup dapat diartikan jumlah penduduk lanjut usia cenderung meningkat sebagai dampak peningkatan kualitas hidup dengan adanya perbaikan pembangunan kualitas kesehatan di Kabupaten Pasuruan.

#### 2.3.4 Persentase Balita Gizi Buruk

Cakupan balita dengan gizi buruk merupakan gambaran kasus gizi buruk pada balita di waktu tertentu, dihitung berdasarkan tanda-tanda fisik dan klinis yang mengarah pada diagnosa gizi buruk. Indikator ini diperoleh dengan mengukur persentase jumlah balita dengan gizi buruk terhadap jumlah balita yang ada di Kabupaten Pasuruan. Cakupan persentase balita dengan gizi buruk di Kabupaten Pasuruan mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berfluktuasi dan menurun di tahun 2024. Akan tetapi jumlah balita yang menderita gizi buruk, terus mengalami penurunan selama 5 (lima) periode terakhir dan disertai juga dengan penurunan jumlah balita pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.



**Gambar 2. 20 Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025

**Tabel 2. 2 Perkembangan Jumlah Balita Gizi Buruk Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024**

| Tahun                               | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Jumlah Balita Gizi Buruk            | 34           | 31           | 30           | 28           | 27           |
| Jumlah Balita                       | 117.832      | 118.395      | 117.907      | 75.653       | 86,439       |
| <b>Persentase Balita Gizi Buruk</b> | <b>0,028</b> | <b>0,026</b> | <b>0,034</b> | <b>0,037</b> | <b>0,031</b> |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2025

Cakupan persentase balita dengan gizi buruk di Kabupaten Pasuruan mulai tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan. Akan tetapi secara jumlah balita yang menderita gizi buruk, terus mengalami penurunan setiap tahunnya selama 5 (lima) periode terakhir. Balita gizi buruk merupakan kondisi serius, dimana asupan makan seseorang tidak sesuai dengan nutrisi yang semestinya diperlukan. Penyebab utama gizi buruk adalah kekurangan asupan makanan yang bernutrisi sesuai kebutuhan masing-masing kelompok usia anak. Kekurangan asupan ini bisa terjadi karena tidak tersedianya bahan makanan yang berkualitas baik. Selain itu salah satu faktor penyebab gizi buruk adalah kemiskinan. Sehingga diperlukan upaya mengurangi beban pengeluaran dari beberapa pihak untuk menekan balita gizi buruk di Kabupaten Pasuruan.

## 2.4 Ketenagakerjaan

Pada bidang ketenagakerjaan, indicator yang dibutuhkan adalah persentase tingkat partisipasi kerja, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat kesempatan kerja. Ketiga indicator ini saling berkaitan satu sama lain, jika persentase tingkat partisipasi Angkatan kerja yang terserap pada pasar kerja formal maka dapat dipastikan bahwa tingkat pengangguran dapat diturunkan. adapun data capaian masing masing indicator tersebut adalah sebagai berikut:

### 2.4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator ekonomi yang mengukur persentase populasi usia kerja yang aktif berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau secara aktif mencari pekerjaan, TPAK memberikan gambaran tentang tingkat keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi dan dapat memberikan wawasan penting tentang kesehatan ekonomi

suatu negara atau wilayah. Adapun capaian TPAK Kabupaten Pasuruan dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 2. 21 Perkembangan TPAK Kabupaten Pasuruan**

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Pasuruan tahun 2020-2024 memiliki capaian yang selalu meningkat. Peningkatan partisipasi angkatan kerja ini mengindikasikan bahwa ada lebih banyak orang usia produktif yang aktif terlibat dalam pasar tenaga kerja. Peningkatan TPAK menunjukkan beberapa hal positif terkait kondisi ekonomi dan sosial di Kabupaten Pasuruan. Kondisi ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena lebih banyak orang yang bekerja akan membuat tingkat produksi barang dan jasa cenderung meningkat juga.

Selanjutnya untuk mengetahui peluang perempuan berpartisipasi dalam dunia kerja diukur dengan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan, dinyatakan dalam satuan persen. Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas.

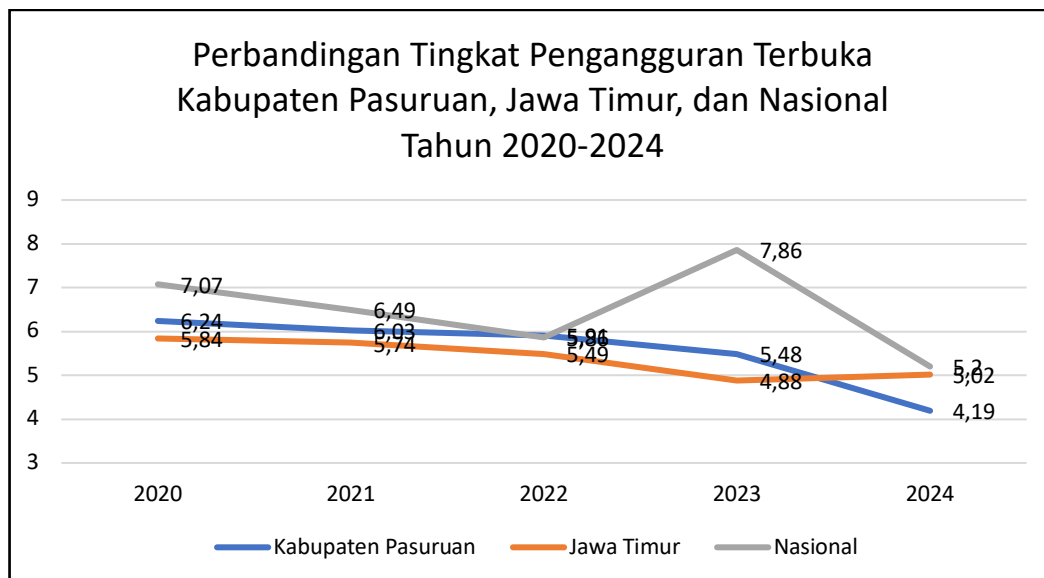


**Gambar 2. 22 Perkembangan TPAK Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Perempuan**

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa capaian TPAK Perempuan Kabupaten Pasuruan mengalami fluktuatif. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023. Capaian tersebut menginterpretasikan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan artinya semakin banyak jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Jika tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 50 persen artinya 1 dari 2 orang penduduk usia kerja perempuan merupakan angkatan kerja.

#### **2.4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan proporsi jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Ketersediaan jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah pencari kerja yang tidak sebanding mengakibatkan timbulnya pengangguran. TPT menggambarkan proporsi jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Ketersediaan jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah pencari kerja yang tidak sebanding mengakibatkan timbulnya pengangguran. TPT Kabupaten Pasuruan tahun 2020-2024 beserta perbandingannya dengan angka Jawa Timur dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 2. 23 Perbandingan Perkembangan TPT Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024**

Sumber: Badan Pusat Statistik

Penurunan tingkat pengangguran di Kabupaten Pasuruan menunjukkan adanya perbaikan dalam pasar kerja, meskipun masih ada tantangan karena tingkat pengangguran di Kabupaten Pasuruan lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Daerah perlu fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, dan menciptakan lapangan kerja baru untuk mengatasi masalah ini. Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama dengan upaya peningkatan pendapatan masyarakat sebagai strategi penurunan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan.

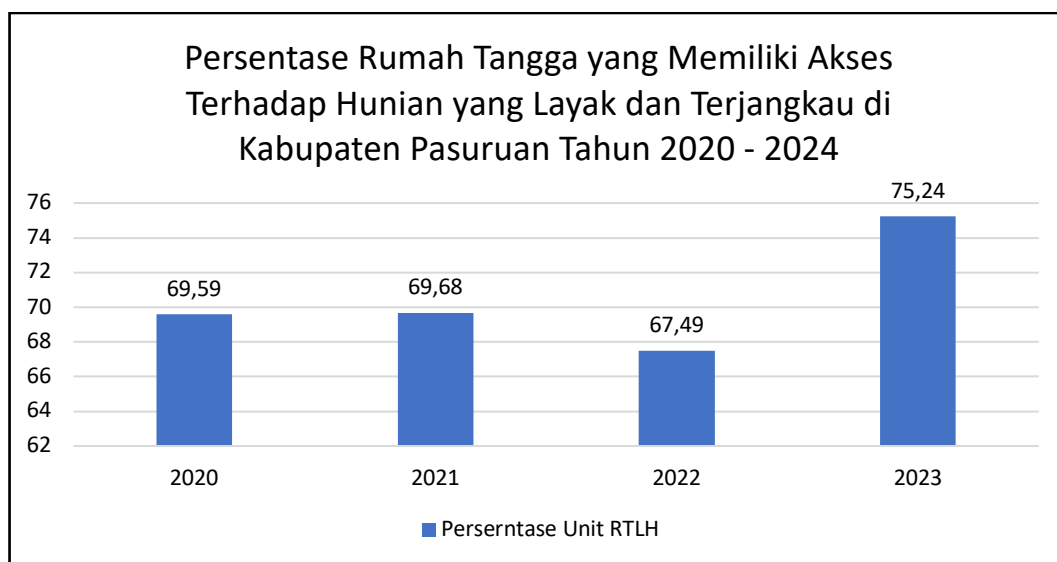
## 2.5 Infrastruktur

Indikator kinerja yang digunakan dalam bidang infrastruktur dasar adalah akses sanitasi layak, akses air minum layak, dan akses listrik. Kabupaten Pasuruan terus melakukan upaya untuk memastikan agar masyarakat dapat mengakses fasilitas air bersih dan menikmati tempat tinggal yang layak. Meskipun belum semua kawasan permukiman kumuh tertata dengan baik, namun demikian berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi degradasi kualitas lingkungan permukiman, dan untuk mendorong perbaikan kondisi kawasan permukiman yang makin baik bagi masyarakat.

Ketersediaan air bersih di rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi sangat penting karena berdampak terhadap tingkat kesehatan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, semakin baik kondisi kesehatan rumah tangga di daerah tersebut. Oleh sebab itu air yang diperlukan rumah tangga harus memenuhi syarat kesehatan, yaitu mencakup fisik, kimia dan bakteriologis. Penggunaan air yang tidak bersih dapat menimbulkan bermacam-macam penyakit, antara lain: penyakit cholera, typhus, disentri dan penyakit kulit. Sumber air yang masuk dalam kelompok air bersih adalah berasal dari, Air kemasan, ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat sebagai berikut:

1. Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Layak Huni (RLH) bagi korban bencana;
2. Fasilitasi penyediaan Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah.



**Gambar 2. 24 Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024**

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan



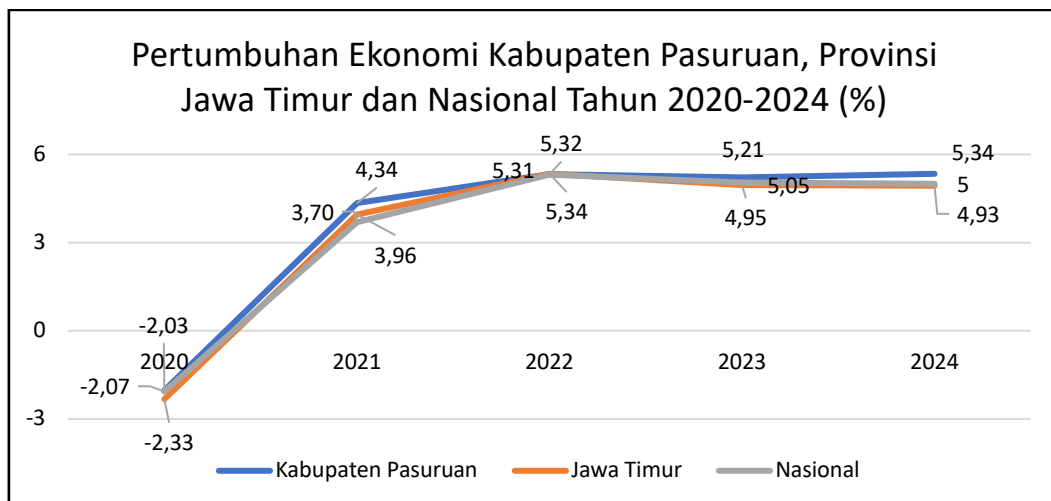
**Gambar 2. 25 Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023**

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan

Kinerja pelayanan urusan perumahan dan kawasan permukiman selain diukur dengan indikator SPM, juga dengan indikator kinerja kunci (IKK) level outcome. Berdasarkan dua gambar diatas dapat dilihat bahwa capaian SPM pada urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH realisasi hingga tahun 2023 adalah 5,4% dan secara akumulasi tertangani sebanyak 20.170 unit rumah atau 47,31%. Kemudian jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU saat ini mencapai 100% atau 145 perumahan (data per Mei 2023), dan terdapat 10 pengembang yang sudah melakukan penyerahan PSU Perumahan kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan, 44 Perumahan masih dalam proses penyerahan.

## 2.6 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan selama empat tahun terakhir mengalami peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pasuruan terjadi pertumbuhan produksi barang dan jasa secara riil dari tahun ke tahun, seperti ditunjukkan dari tahun ke tahun selama kurun waktu Tahun 2020-2024. Pada tahun 2021 kondisi perekonomian Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan setelah adanya krisis karena Covid-19. Kemudian kondisi perekonomian Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan hingga stabil. Adapun kondisi perekonomian Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 2. 26 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024**

Sumber : Badan Pusat Statistik

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan dalam lima tahun terakhir selalu di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Jika pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan lebih tinggi dari Provinsi Jawa Timur dan nasional, ini menunjukkan bahwa Kabupten Pasuruan memiliki potensi ekonomi yang kuat dan mampu menarik investasi. Pemerintah harus fokus pada pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan dukungan terhadap sektor-sektor unggulan untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan tersebut.

Menurut Kuznet (Tulus Tambunan, 2001), pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Selanjutnya menurut penelitian Deni Tisna (2008) menyatakan bahwa PDRB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

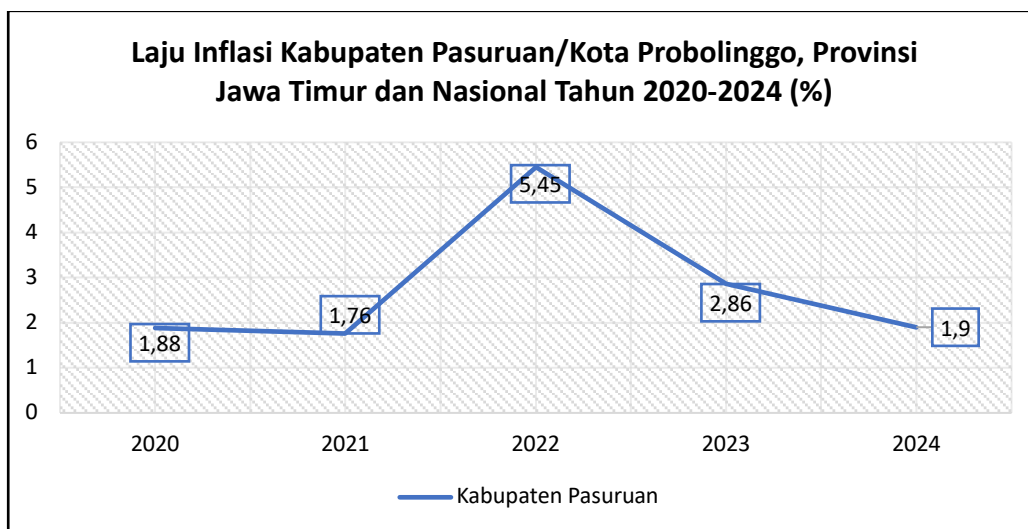
Siregar (2006) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan (necessary condition) bagi pengurangan kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya (sufficient condition) ialah bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin (growth with equity). Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja (pertanian atau

sektor yang padat karya). Adapun secara tidak langsung, hal itu berarti diperlukan peran pemerintah yang cukup efektif meredistribusi manfaat pertumbuhan yang boleh jadi didapatkan dari sektor modern seperti jasa dan manufaktur.

### 2.6.1 Inflasi

Inflasi merupakan perubahan indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen diperoleh melalui survey dilaksanakan oleh BPS setiap bulan terhadap sejumlah harga barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat. Laju Inflasi perlu dilakukan pengendalian karena berdampak pada tingkat daya beli masyarakat. Inflasi yang tinggi akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Survey BPS di Jawa Timur hanya dilakukan di 8 (delapan) Kabupaten/Kota, yaitu: (1) Kabupaten Jember ; (2) Kabupaten Banyuwangi; (3) Kabupaten Sumenep ; (4) Kota Kediri ; (5) Kota Malang ; (6) Kota Probolinggo ; (7) Kota Madiun ; dan Kota (8) Kota Surabaya. Berdasarkan hal tersebut maka dalam menggambarkan inflasi di Kabupaten Pasuruan mengacu pada daerah yang memiliki kemiripan pola konsumsi masyarakat, yaitu Kota Probolinggo.

Perkembangan inflasi dalam periode tahun 2019-2023 Kabupaten Pasuruan/Kota Probolinggo beserta perbandingannya dengan inflasi Jawa Timur dan Nasional sebagaimana gambar dibawah ini. Secara umum inflasi dapat dikendalikan, namun terjadi lompatan yang tinggi secara menyeluruh terjadi di tahun 2022. Namun pada tahun 2023 kondisi inflasi Kembali dapat dikendalikan.



**Gambar 2. 27 Inflasi Kabupaten Pasuruan/Kota Probolinggo, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024**

Sumber: Badan Pusat Statistik

**BAB III**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI (RAT) KEMISKINAN**  
**KABUPATEN PASURUAN**

**3.1 Hasil Evaluasi Kinerja Tahun Sebelumnya**

Hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya digunakan untuk melihat sejauh mana komitmen Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menanggulangi masalah kemiskinan yang ada, dibuktikan dengan capaian-capaian atau kinerja pelaksanaan program dan kegiatannya. Berikut adalah hasil capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024:

**Tabel 3. 1 Hasil Evaluasi Kinerja Tahun Sebelumnya Kabupaten Pasuruan**

| Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan             | Indikator Kinerja program (outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan                                                                                       | Operasi         |                    | Modal          |                   | Perangkat Daerah                |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|
|                                                 |                                                                                                                                                         | Anggaran 2024   | Realisasi 2024     | Anggaran 2024  | Realisasi 2024    |                                 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN           |                                                                                                                                                         |                 |                    |                |                   |                                 |
| PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                  |                                                                                                                                                         | 264.484.891.270 | 238.413.170.053,00 | 58.702.701.568 | 51.786.388.417,00 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar            | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam pendidikan dasar                                                             | 101.366.889.675 | 91.516.836.127,00  | 45.526.772.832 | 41.051.367.337,00 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar              | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                                                                                      | 94.580.675.953  | 84.802.440.453,00  | 16.332.784.047 | 15.216.123.546,00 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama                                                 | 48.823.701.322  | 34.894.040.796,00  | 12.622.457.464 | 10.312.941.458,00 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama   | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS                                                                                                 | 42.341.850.752  | 28.445.911.900,00  | 6.230.579.248  | 4.659.528.700,00  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)    | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD                                                                          | 39.630.111.428  | 39.046.778.130,00  | 553.471.272    | 422.079.622,00    | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Pengelolaan Dana BOP PAUD                       | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP                                                                                                                     | 3.600.000.000   | 3.600.000.000,00   | 0              | 0                 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Pembangunan Sarana, prasarana dan utilitas PAUD | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun                                                                                           | 1.687.390.808   | 1.561.757.567,00   | 0              | 0                 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan    | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 74.664.188.845  | 72.955.515.000,00  | 0              | 0                 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |

| Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan                                                  | Indikator Kinerja program (outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan                                           | Operasi         |                    | Modal          |                   | Perangkat Daerah                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|
|                                                                                      |                                                                                                             | Anggaran 2024   | Realisasi 2024     | Anggaran 2024  | Realisasi 2024    |                                 |
| Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                    | Jumlah sekolah nonformal/kesetaraan yang mengelola dana BOP                                                 | 25.774.200.000  | 25.774.200.000,00  | 0              | 0,00              | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                                    | Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar                                               | 3.784.545.545   | 2.423.100.000,00   | 0              | 0                 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>                                          |                                                                                                             |                 |                    |                |                   |                                 |
| <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>   |                                                                                                             | 198.355.574.732 | 187.269.945.695,00 | 22.521.231.104 | 21.838.686.460,00 | Dinas Kesehatan                 |
| Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                             | 17.700.103.388  | 17.164.116.116,00  | 22.521.231.104 | 21.838.686.460,00 | Dinas Kesehatan                 |
| Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                               | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                 | 2.725.046.590   | 2.089.104.982,00   | 0              | 0                 | Dinas Kesehatan                 |
| Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                               | 158.121.184.132 | 149.181.068.384,00 | 0              | 0                 | Dinas Kesehatan                 |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                                               | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                           | 80.000.000      | 74.593.000,00      | 0              | 0                 | Dinas Kesehatan                 |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                                      | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                  | 497.806.560     | 495.550.300,00     | 0              | 0                 | Dinas Kesehatan                 |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga                    | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas | 71.232.000      | 70.945.100,00      | 0              | 0                 | Dinas Kesehatan                 |

| Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan                                        | Indikator Kinerja program (outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan                                 | Operasi       |                | Modal         |                | Perangkat Daerah |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
|                                                                            |                                                                                                   | Anggaran 2024 | Realisasi 2024 | Anggaran 2024 | Realisasi 2024 |                  |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                               | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                           | 80.000.000    | 77.768.800,00  | 0             | 0              | Dinas Kesehatan  |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                  | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                              | 20.540.000    | 3.555.000,00   | 0             | 0              | Dinas Kesehatan  |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA                             | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                                    | 91.265.800    | 72.384.900,00  | 0             | 0              | Dinas Kesehatan  |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                   | 20.480.000    | 16.400.000,00  | 0             | 0              | Dinas Kesehatan  |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat           | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 80.000.000    | 66.790.000,00  | 0             | 0              | Dinas Kesehatan  |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                  | 50.000.000    | 43.595.350,00  | 0             | 0              | Dinas Kesehatan  |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV         | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                      | 8.000.000     | 0,00           | 0             | 0              | Dinas Kesehatan  |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                 | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar             | 1.920.000     | 1.920.000,00   | 0             | 0              | Dinas Kesehatan  |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                 | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar             | 14.400.000    | 14.400.000,00  | 0             | 0              | Dinas Kesehatan  |

| Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan                                                                                                                     | Indikator Kinerja program (outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan                     | Operasi        |                  | Modal          |                   | Perangkat Daerah    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                         |                                                                                       | Anggaran 2024  | Realisasi 2024   | Anggaran 2024  | Realisasi 2024    |                     |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                                                                                                     | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar    | 125.000.000    | 109.840.607,00   | 0              | 0                 | Dinas Kesehatan     |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus                                                                                              | Jumlah Penderita Diabetes Militus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1.626.203.000  | 1.334.801.920,00 | 0              | 0                 | Dinas Kesehatan     |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi                                                                                                    | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar       | 100.000.000    | 83.686.750,00    | 0              | 0                 | Dinas Kesehatan     |
| Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria                                                                                                                 | Jumlah Penderita malaria yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar          | 200.679.950    | 190.641.110,00   | 0              | 0                 | Dinas Kesehatan     |
| Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis                                                                                               | Jumlah Penderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar     | 6.720.000      | 6.720.000,00     | 0              | 0                 | Dinas Kesehatan     |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                                                                                        | Jumlah Penduduk usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar       | 230.000.000    | 225.009.050,00   | 0              | 0                 | Dinas Kesehatan     |
| <b>URUSAN SDA</b>                                                                                                                                       |                                                                                       |                |                  |                |                   |                     |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>                                                                                                        | Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)                                                  | 10.189.480.977 | 9.694.988.425,00 | 27.611.796.662 | 17.880.115.675,00 | Dinas SDA CK dan TR |
| Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota |                                                                                       | 4.369.354.132  | 4.009.325.840,00 | 24.675.855.929 | 15.100.498.475,00 | Dinas SDA CK dan TR |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                 | Panjang Jaringan irigasi Permukaan yang Direhabilitasi                                | 1.695.187.427  | 1.568.457.547,00 | 24.484.014.989 | 14.934.189.634,00 | Dinas SDA CK dan TR |

| Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan                                                               | Indikator Kinerja program (outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan                                        | Operasi        |                   | Modal         |                  | Perangkat Daerah               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|------------------|--------------------------------|
|                                                                                                   |                                                                                                          | Anggaran 2024  | Realisasi 2024    | Anggaran 2024 | Realisasi 2024   |                                |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>                           | Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak                               | 28.612.922.941 | 24.579.326.400,00 | 0             | 0                | Dinas SDA CK dan TR            |
| Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota          | Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak                               | 28.612.922.941 | 24.579.326.400,00 | 0             | 0                | Dinas SDA CK dan TR            |
| Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                                 | Kapasitas Sistem penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun                            | 28.374.418.541 | 24.385.250.400,00 | 0             | 0                | Dinas SDA CK dan TR            |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>                                     | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi / air limbah domestik (layak & aman) | 2.369.132.000  | 2.164.014.690,00  | 0             | 0                | Dinas SDA CK dan TR            |
| Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota               | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi / air limbah domestik (layak & aman) | 2.369.132.000  | 2.164.014.690,00  | 0             | 0                | Dinas SDA CK dan TR            |
| Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun         | 2.169.332.000  | 2.164.014.690,00  | 0             | 0                | Dinas SDA CK dan TR            |
| <b>URUSAN KAWASAN DAN PERMUKIMAN</b>                                                              |                                                                                                          |                |                   |               |                  |                                |
| <b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>                                                             | Prosentase tercapainya pengembangan perumahan                                                            | 315.721.400    | 314.528.700,00    | 2.014.650.000 | 1.715.059.900,00 | Dinas Perumahan dan Permukiman |

| Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan                                                             | Indikator Kinerja program (outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan                                                                           | Operasi        |                   | Modal         |                  | Perangkat Daerah               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|------------------|--------------------------------|
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | Anggaran 2024  | Realisasi 2024    | Anggaran 2024 | Realisasi 2024   |                                |
| Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen data rumah korban bencana yang disediakan dan direhab atau di lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota | 215.721.400    | 215.513.900,00    | 0             | 0,00             | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota     | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota                        | 200.000.000    | 199.897.200,00    |               |                  | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota          |                                                                                                                                             | 100.000.000    | 99.014.800,00     | 2.014.650.000 | 1.715.059.900,00 | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana                                                          | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi                                                                              | 100.000.000    | 99.014.800,00     |               |                  | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                         | Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi korban Bencana kabupaten/kota                                                                          | 0              | 0,00              | 2.014.650.000 | 1.715.059.900,00 | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| <b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>                                                               | Persentase pengurangan kawasan kumuh<br>Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang direhab                                                      |                |                   |               |                  | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha               | Luas permukiman kumuh yang ditangani secara tuntas                                                                                          | 12.091.121.613 | 12.065.159.866,00 | 0             | 0,00             | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh                                                  | Luas permukiman kumuh yang dipugar                                                                                                          | 2.603.550.529  | 2.597.232.157,00  | 0             | 0,00             | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni                                                                | jumlah Rumah tidak layak huni yang diperbaiki                                                                                               | 9.487.571.084  | 9.467.927.709,00  | 0             | 0,00             | Dinas Perumahan dan Permukiman |

| Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan                                                                           | Indikator Kinerja program (outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan                                                                                                                                                                           | Operasi       |                  | Modal         |                  | Perangkat Daerah               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|--------------------------------|
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                             | Anggaran 2024 | Realisasi 2024   | Anggaran 2024 | Realisasi 2024   |                                |
| <b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>                                          | Persentase Penyediaan PSU di perumahan dan kawasan permukiman                                                                                                                                                                               | 9.438.363.502 | 8.921.382.315,00 | 2.378.892.060 | 2.300.277.900,00 | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan                                                                          | Persentase Penyediaan PSU di perumahan dan kawasan permukiman                                                                                                                                                                               | 9.438.363.502 | 8.921.382.315,00 | 2.378.892.060 | 2.300.277.900,00 | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan                                                                          | Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)                                                                                                                                                                               | 376.918.810   | 374.179.200,00   |               |                  | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian                    | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian (lokasi)                                                                                                                           | 8.540.247.679 | 8.080.994.800,00 | 2.378.892.060 | 2.300.277.900,00 | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>              |                                                                                                                                                                                                                                             |               |                  |               |                  |                                |
| <b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>                                                                         | Persentase Layanan Penanggulangan Bencana yang Berkualitas                                                                                                                                                                                  | 3.601.466.865 | 3.575.441.122,00 | 2.372.081.000 | 2.361.654.000,00 | BPBD                           |
| Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota                                                              | Jumlah Informasi Rawan Bencana yang Tersampaikan                                                                                                                                                                                            | 1.802.994.000 | 1.793.341.600,00 | 14.580.000    | 14.500.000,00    | BPBD                           |
| Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di | 1.802.994.000 | 1.793.341.600,00 | 14.580.000    | 14.500.000,00    | BPBD                           |

| Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan                                         | Indikator Kinerja program (outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan                                           | Operasi       |                | Modal         |                  | Perangkat Daerah |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
|                                                                             |                                                                                                             | Anggaran 2024 | Realisasi 2024 | Anggaran 2024 | Realisasi 2024   |                  |
|                                                                             | Kawasan Tempat Tinggalnya                                                                                   |               |                |               |                  |                  |
| Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                     | Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (%)  | 995.019.065   | 992.435.070,00 | 154.501.000   | 150.544.000,00   | BPBD             |
| Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam                                     | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)                           | 29.620.000    | 29.200.000,00  | 0             | 0,00             | BPBD             |
| Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                          | Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban (%)   | 405.310.800   | 403.860.782,00 | 2.203.000.000 | 2.196.610.000,00 | BPBD             |
| Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota           | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (orang)          | 18.210.000    | 18.196.700,00  | 3.000.000     | 3.000.000,00     | BPBD             |
| Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang) | 186.330.000   | 186.226.382,00 | 1.600.000.000 | 1.594.000.000,00 | BPBD             |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                           |                                                                                                             |               |                |               |                  |                  |

| Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan                                                           | Indikator Kinerja program (outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan                                                               | Operasi        |                   | Modal         |                | Perangkat Daerah |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|------------------|
|                                                                                               |                                                                                                                                 | Anggaran 2024  | Realisasi 2024    | Anggaran 2024 | Realisasi 2024 |                  |
| <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>                                                            | Persentase masyarakat miskin yang diberdayakan                                                                                  | 11.130.547.451 | 10.752.663.802,00 | 0             | 0,00           | Dinas Sosial     |
| Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)                                            | Persentase keluarga miskin yang mendapatkan manfaat                                                                             | 9.565.356.841  | 9.476.034.742,00  | 0             | 0,00           | Dinas Sosial     |
| Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT                                                            | Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)                    | 8.868.895.252  | 8.812.661.742,00  | 0             | 0,00           | Dinas Sosial     |
| Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota                        | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang melakukan pelayanan kesejahteraan sosial                                    | 1.542.476.210  | 1.261.564.060,00  | 0             | 0,00           | Dinas Sosial     |
| Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota             | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                 | 159.765.400    | 134.084.501,00    | 0             | 0,00           | Dinas Sosial     |
| Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 361.783.000    | 345.840.000,00    | 0             | 0,00           | Dinas Sosial     |
| Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                                        | 137.947.499    | 5.952.300,00      | 0             | 0,00           | Dinas Sosial     |
| <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>                                                            | Persentase PPKS yang memerlukan Rehabilitasi                                                                                    | 1.764.814.325  | 1.688.305.841,56  | 0             | 0,00           | Dinas Sosial     |

| Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan                                                                                                                           | Indikator Kinerja program (outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan                                                                                                                            | Operasi       |                  | Modal         |                | Perangkat Daerah |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              | Anggaran 2024 | Realisasi 2024   | Anggaran 2024 | Realisasi 2024 |                  |
| Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial            | Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi                                                                                                                                      | 1.624.571.635 | 1.583.912.288,56 | 0             | 0,00           | Dinas Sosial     |
| Penyediaan Permakanan                                                                                                                                         | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                    | 857.500.000   | 852.623.000,00   | 0             | 0,00           | Dinas Sosial     |
| Penyediaan Alat Bantu                                                                                                                                         | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                    | 84.049.895    | 78.488.080,00    | 0             | 0,00           | Dinas Sosial     |
| Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial                                                                                                      | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                       | 357.536.000   | 343.716.800,00   | 0             | 0,00           | Dinas Sosial     |
| Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 300.960.740   | 289.614.808,56   | 0             | 0,00           | Dinas Sosial     |
| Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA                             | Persentase Pemerlu Yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial                                                                                                                            | 10.293.190    | 7.923.200,00     |               |                | Dinas Sosial     |

| Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan                         | Indikator Kinerja program (outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan                                                                       | Operasi        |                   | Modal         |                | Perangkat Daerah |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|------------------|
|                                                             |                                                                                                                                         | Anggaran 2024  | Realisasi 2024    | Anggaran 2024 | Realisasi 2024 |                  |
| Pemberian Layanan Rujukan                                   | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                      | 48.320.000     | 43.013.850,00     | 0             | 0,00           | Dinas Sosial     |
| Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                    | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/Kota                                                  | 7.867.500      | 5.790.900,00      |               |                | Dinas Sosial     |
| Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                    | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota                                                  | 8.492.500      | 5.086.603,00      | 0             | 0,00           | Dinas Sosial     |
| <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>              | Persentase penerima bantuan sosial sesuai data DTKS                                                                                     | 14.828.709.266 | 14.758.290.270,00 | 0             | 0,00           | Dinas Sosial     |
| Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase korban bencana yang mendapatkan pelayanan                                                                                    | 14.828.709.266 | 14.758.290.270,00 | 0             | 0,00           | Dinas Sosial     |
| Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga            | Jumlah Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga) | 14.718.444.860 | 14.657.623.981,00 | 0             | 0,00           | Dinas Sosial     |
| Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota        | jumlah fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota yang didata                                                                           | 2.740.000      | 2.737.250,00      | 0             | 0,00           | Dinas Sosial     |
| Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota                                                                | 104.001.266    | 97.929.039,00     | 0             | 0,00           | Dinas Sosial     |

| Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan                                 | Indikator Kinerja program (outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan                                                    | Operasi       |                | Modal         |                | Perangkat Daerah      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|
|                                                                     |                                                                                                                      | Anggaran 2024 | Realisasi 2024 | Anggaran 2024 | Realisasi 2024 |                       |
| <b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>                                   | Indeks kepuasan masyarakat terhadap penanganan bencana                                                               | 710.570.743   | 683.819.772,00 | 3.316.680     | 2.988.000,00   | Dinas Sosial          |
| Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/Kota   | Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Pelayanan                                                                 | 8.927.015     | 7.832.293,00   | 0             | 0,00           | Dinas Sosial          |
| Penyediaan Makanan                                                  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | 8.310.015     | 7.832.293,00   | 0             | 0,00           | Dinas Sosial          |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>                      |                                                                                                                      |               |                |               |                |                       |
| <b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>                              | Persentase pencari kerja yang ditempatkan                                                                            | 242.990.000   | 223.578.007,00 | 0             | 0,00           | Dinas Ketenagakerjaan |
| Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Pelayanan Perlindungan PMI (PMI Pra dan Purna Penempatan) di Daerah)                                      | 7.010.000     | 5.911.500,00   | 0             | 0,00           | Dinas Ketenagakerjaan |
| Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan              | Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (%)                                                                               | 7.010.000     | 5.911.500,00   | 0             | 0,00           | Dinas Ketenagakerjaan |
| Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota                       |                                                                                                                      | 17.514.000    | 15.193.000,00  | 0             | 0,00           | Dinas Ketenagakerjaan |
| Job Fair/Bursa Kerja                                                | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja                                         | 204.976.000   | 190.452.507,00 | 0             | 0,00           | Dinas Ketenagakerjaan |
| Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota                       | -                                                                                                                    | 7.240.000     | 6.429.000,00   | 0             | 0,00           | Dinas Ketenagakerjaan |
| Perluasan Kesempatan Kerja                                          | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja                                     | 2.600.000     | 2.340.000,00   | 0             | 0,00           | Dinas Ketenagakerjaan |



| Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan                                                                                                   | Indikator Kinerja program (outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan                                                                            | Operasi       |                | Modal         |                | Perangkat Daerah                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | Anggaran 2024 | Realisasi 2024 | Anggaran 2024 | Realisasi 2024 |                                      |
| Pengelolaan Informasi Pasar Kerja                                                                                                     | -                                                                                                                                            | 218.466.000   | 202.473.507,00 | 0             | 0,00           | Dinas Ketenagakerjaan                |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>                                                        |                                                                                                                                              |               |                |               |                |                                      |
| <b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>                                                                                                 | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)                                                           | 153.900.000   | 151.507.750,00 | 0             | 0,00           | DP3AP2KB                             |
| Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota              | Jumlah layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan yang terstandarisasi                                                                  | 95.500.000    | 94.887.000,00  | 0             | 0,00           | DP3AP2KB                             |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 89.500.000    | 88.887.000,00  | 0             | 0,00           | DP3AP2KB                             |
| <b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>                                                                      | -                                                                                                                                            | 654.999.000   | 629.414.000,00 | 0             | 0,00           | DP3AP2KB                             |
| Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota            | -                                                                                                                                            | 560.000.000   | 537.495.000,00 | 0             | 0,00           | DP3AP2KB                             |
| Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi                                           | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota    | 560.000.000   | 537.495.000,00 | 0             | 0,00           | DP3AP2KB                             |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>                                                                                              |                                                                                                                                              |               |                |               |                |                                      |
| <b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>                                                                                            | Persentase desa/kelurahan rawan pangan yang tertangani                                                                                       | 234.087.500   | 157.111.811,00 | 0             | 0,00           | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |



| Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan                                                                                                         | Indikator Kinerja program (outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan                                                                      | Operasi       |                | Modal         |                | Perangkat Daerah                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | Anggaran 2024 | Realisasi 2024 | Anggaran 2024 | Realisasi 2024 |                                      |
| Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota                                                                                       | Desa rawan pangan yang dibina                                                                                                          | 234.087.500   | 157.111.811,00 | 0             | 0,00           | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | 234.087.500   | 157.111.811,00 | 0             | 0,00           | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>                                                      | Persentase pemanfaatan infrastruktur pangan                                                                                            | 50.660.350    | 36.401.560,00  | 0             | 0,00           | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                   | Persentase peningkatan penyediaan infrastruktur pangan                                                                                 | 50.660.350    | 36.401.560,00  | 0             | 0,00           | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya                                                                               | jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia                                                                        | 50.660.350    | 36.401.560,00  | 0             | 0,00           | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| <b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>                                                                    | Skor pola pangan harapan                                                                                                               | 432.026.700   | 366.703.927,00 | 0             | 0,00           | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi                                            | Meningkatnya skor pola pangan harapan                                                                                                  | 318.338.700   | 266.265.877,00 | 0             | 0,00           | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                   | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                              | 312.515.700   | 260.620.877,00 | 0             | 0,00           | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>                                                            |                                                                                                                                        |               |                |               |                |                                      |

| Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan                                                                                           | Indikator Kinerja program (outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan                                                                        | Operasi       |                | Modal         |                | Perangkat Daerah                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                               |                                                                                                                                          | Anggaran 2024 | Realisasi 2024 | Anggaran 2024 | Realisasi 2024 |                                         |
| <b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>                                                                                           | Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan                                                                                      | 199.972.400   | 190.532.930,00 | 0             | 0,00           | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                                                | Persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk                                                                              | 53.516.500    | 52.364.040,00  | 0             | 0,00           | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia | 45.900.000    | 45.814.140,00  | 0             | 0,00           | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| <b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>                                                                                               | Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil                                                                                  | 182.753.538   | 171.698.245,00 | 0             | 0,00           | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                    | Jumlah laporan hasil pelayanan                                                                                                           | 55.192.188    | 53.971.700,00  | 0             | 0,00           | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                  | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan                                                                                        | 55.192.188    | 53.971.700,00  | 0             | 0,00           | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>                                                                | Persentase penyediaan database kependudukan dan pencapil di tingkat kabupaten                                                            | 183.581.600   | 179.611.700,00 | 0             | 0,00           | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan                                             | Jumlah laporan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan                                         | 10.945.420    | 10.315.500,00  | 0             | 0,00           | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan                                                                                    | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan                                                                               | 10.945.420    | 10.315.500,00  | 0             | 0,00           | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>                                                                                | Ketersediaan database yang terkalifikasi                                                                                                 | 65.478.550    | 64.413.847,00  | 0             | 0,00           | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan                                            | Indikator Kinerja program (outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan          | Operasi        |                   | Modal         |                | Perangkat Daerah                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------|
|                                                                                |                                                                            | Anggaran 2024  | Realisasi 2024    | Anggaran 2024 | Realisasi 2024 |                                         |
| Penyusunan Profil Kependudukan                                                 | Jumlah penyusunan buku profil kependudukan                                 | 65.478.550     | 64.413.847,00     | 0             | 0,00           | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota                                    | Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota                                    | 29.608.350     | 29.119.250,00     | 0             | 0,00           | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>             |                                                                            |                |                   |               |                |                                         |
| <b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>                                                   | Persentase desa memiliki sarana prasarana yang memadai                     | 15.000.000     | 11.387.000,00     | 0             | 0,00           | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  |
| Penyelenggaraan Penataan Desa                                                  | Jumlah desa yang mendapatkan fasilitas sarana prasarana                    | 15.000.000     | 11.387.000,00     | 0             | 0,00           | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  |
| Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa                                           | Jumlah Sarana dan Prasarana Desa                                           | 15.000.000     | 11.387.000,00     | 0             | 0,00           | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  |
| <b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>                                  | Persentase desa yang tertib administrasi perencanaan dan perkembangan desa | 12.922.133.538 | 12.554.343.277,00 | 0             | 0,00           | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  |
| Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa        | Jumlah status BUMDesa yang meningkat                                       | 12.922.133.538 | 12.554.343.277,00 | 0             | 0,00           | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  |
| Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                      | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa              | 250.000.000    | 203.649.131,00    | 0             | 0,00           | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  |
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                           | Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa                                   | 123.600.790    | 111.736.440,00    | 0             | 0,00           | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b> |                                                                            |                |                   |               |                |                                         |
| <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>                                           | Persentase kecamatan yang melakukan updating SIGA                          | 598.800.000    | 552.046.035,00    | 0             | 0,00           | DP3AP2KB                                |

| Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan                                                                                                                              | Indikator Kinerja program (outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan                                                            | Operasi        |                   | Modal         |                  | Perangkat Daerah       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              | Anggaran 2024  | Realisasi 2024    | Anggaran 2024 | Realisasi 2024   |                        |
| Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                           | Persentase kecamatan yang melakukan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk                                                 | 548.800.000    | 503.018.185,00    | 0             | 0,00             | DP3AP2KB               |
| Perumusan Parameter Kependudukan                                                                                                                                 | Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan                                                                        | 10.000.000     | 9.860.000,00      | 0             | 0,00             | DP3AP2KB               |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>                                                                                                                    |                                                                                                                              |                |                   |               |                  |                        |
| <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>                                                                                             | Prosentase Prasarana Jalan yang tersedia                                                                                     | 17.498.554.659 | 16.589.338.888,00 | 9.381.057.342 | 9.297.150.065,00 | Dinas Perhubungan      |
| Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                               | Prosentase Jumlah angkutan umum yang tersedia                                                                                | 448.305.300    | 392.643.490,00    | 57.981.460    | 56.705.000,00    | Dinas Perhubungan      |
| Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                               | Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia | 417.435.300    | 367.128.490,00    | 57.981.460    | 56.705.000,00    | Dinas Perhubungan      |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>                                                                                            |                                                                                                                              |                |                   |               |                  |                        |
| <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>                                                                                  | Persentase UMK yang meningkat kualitas (Terstandarisasi) dan atau terbentuknya jaringan kemitraan                            | 1.152.320.000  | 1.060.873.468,00  | 0             | 0,00             | Dinas Koperasi dan UKM |
| Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan | Jumlah UMK yang meningkat kualitas produknya dan atau terbentuknya jaringan kemitraan                                        | 1.152.320.000  | 1.060.873.468,00  | 0             | 0,00             | Dinas Koperasi dan UKM |
| Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro                                                                                                                       | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro                                                              | 245.332.000    | 240.523.500,00    | 0             | 0,00             | Dinas Koperasi dan UKM |

| Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja program (outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan                                      | Operasi       |                  | Modal         |                | Perangkat Daerah |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
|                                                                                                                                                          |                                                                                                        | Anggaran 2024 | Realisasi 2024   | Anggaran 2024 | Realisasi 2024 |                  |
| Pemulihan Usaha Mikro                                                                                                                                    | Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi                                                                  | 446.688.000   | 442.375.318,00   | 0             | 0,00           |                  |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>                                                                                                 |                                                                                                        |               |                  |               |                |                  |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>                                                                                                             | Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap                                                      | 1.581.741.810 | 1.573.747.232,00 | 0             | 0,00           | Dinas Perikanan  |
| Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase produksi perikanan tangkap di laut (%)                                                      | 1.053.489.210 | 1.049.549.930,00 | 0             | 0,00           | Dinas Perikanan  |
| Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                   | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia                                       | 888.787.910   | 885.520.830,00   | 0             | 0,00           | Dinas Perikanan  |
| Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                   | persentase nelayan yang mendapat pendampingan                                                          | 457.017.600   | 454.313.000,00   | 0             | 0,00           | Dinas Perikanan  |
| Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil                                                                                                                     | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                    | 97.429.600    | 96.012.500,00    | 0             | 0,00           | Dinas Perikanan  |
| Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil                                                                            | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya            | 11.155.000    | 10.855.000,00    | 0             | 0,00           | Dinas Perikanan  |
| Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha                                                                            | Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | 348.433.000   | 347.445.500,00   | 0             | 0,00           | Dinas Perikanan  |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>                                                                                                            | Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya                                                     | 1.248.454.050 | 1.199.585.409,00 | 0             | 0,00           | Dinas Perikanan  |
| Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                                                     | Persentase pembudiaya ikan yang terfasilitasi (%)                                                      | 229.509.050   | 210.569.920,00   | 0             | 0,00           | Dinas Perikanan  |

| Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja program (outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan                                                                                             | Operasi       |                  | Modal         |                | Perangkat Daerah |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               | Anggaran 2024 | Realisasi 2024   | Anggaran 2024 | Realisasi 2024 |                  |
| Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 133.763.500   | 120.188.450,00   | 0             | 0,00           | Dinas Perikanan  |
| Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                    | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas                                                                                 | 95.745.550    | 90.381.470,00    | 0             | 0,00           | Dinas Perikanan  |
| Pengelolaan Pembudidayaan Ikan                                                                                                    | -                                                                                                                                                             | 1.018.945.000 | 989.015.489,00   | 0             | 0,00           | Dinas Perikanan  |
| Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                            | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                         | 211.027.000   | 188.008.700,00   | 0             | 0,00           | Dinas Perikanan  |
| Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                      | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                      | 230.030.000   | 226.274.289,00   | 0             | 0,00           | Dinas Perikanan  |
| Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat                                   | Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan                                                                                   | 47.409.000    | 47.018.500,00    | 0             | 0,00           | Dinas Perikanan  |
| <b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>                                                                           | -                                                                                                                                                             | 1.132.512.900 | 1.110.771.772,00 | 0             | 0,00           | Dinas Perikanan  |
| Penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil                                         |                                                                                                                                                               | 104.280.000   | 102.682.177,00   | 0             | 0,00           | Dinas Perikanan  |
| Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                 | Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko                                                   | 104.280.000   | 102.682.177,00   | 0             | 0,00           | Dinas Perikanan  |

| Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan                                                                        | Indikator Kinerja program (outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan                                             | Operasi       |                  | Modal         |                | Perangkat Daerah                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|--------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                                                                               | Anggaran 2024 | Realisasi 2024   | Anggaran 2024 | Realisasi 2024 |                                      |
| Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota     | Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 752.114.000   | 736.724.095,00   | 0             | 0,00           | Dinas Perikanan                      |
| Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi   | 187.667.000   | 185.647.250,00   | 0             | 0,00           | Dinas Perikanan                      |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>                                                                |                                                                                                               |               |                  |               |                |                                      |
| <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>                                                | Persentase peningkatan sarana pertanian                                                                       | 2.901.798.900 | 2.252.300.481,00 | 0             | 0,00           | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| Pembangunan Prasarana Pertanian                                                                            | Persentase sarana pendukung pertanian yang diawasi                                                            | 7.515.612.740 | 7.168.274.728,00 | 0             | 0,00           | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani                                                | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara                                                 | 5.029.986.100 | 4.892.746.400,00 | 0             | 0,00           | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian                                                                     | Persentase pengawasan Penggunaan Sarana Peternakan                                                            | 30.500.000    | 30.482.000,00    | 0             | 0,00           | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                         | Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian                                                     | 30.250.000    | 30.232.000,00    | 0             | 0,00           | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARNA PERTANIAN</b>                                              | Persentase pemenuhan prasarana penunjang budidaya pertanian                                                   | 400.750.000   | 398.128.000,00   | 0             | 0,00           | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| Pembangunan prasarana pertanian                                                                            | Penetapan Pengendalian lahan pangan berkelanjutan                                                             | 400.250.000   | 397.628.000,00   | 0             | 0,00           | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya                                     | Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara                               | 400.000.000   | 397.378.000,00   | 0             | 0,00           | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |

| Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan                                                           | Indikator Kinerja program (outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan                                                       | Operasi       |                | Modal         |                | Perangkat Daerah                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------------------------------|
|                                                                                               |                                                                                                                         | Anggaran 2024 | Realisasi 2024 | Anggaran 2024 | Realisasi 2024 |                                      |
| <b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>                              | Persentase bencana pertanian yang ditanggulangi                                                                         | 297.691.000   | 220.483.600,00 | 0             | 0,00           | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota                              | Jumlah wilayah yang dapat dikendalikan dan tertanggulangi bencana                                                       | 297.691.000   | 220.483.600,00 | 0             | 0,00           | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang dikendalikan | 261.060.200   | 191.086.800,00 | 0             | 0,00           | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |

### 3.2 Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan merupakan upaya yang dilakukan terus menerus karena kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin dan keterbatasan sumber daya. Untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar langkah langkah penanggulangan kemiskinan tidak dapat ditangani sendiri oleh satu sektor, tetapi harus multi sektor dan lintas sektor dengan melibatkan stakeholders terkait untuk meningkatkan efektivitas pencapaian program yang dijalankan. Oleh sebab itu langkah-langkah yang ditempuh dalam penanggulangan kemiskinan dijabarkan ke dalam berbagai program pembangunan.

Komitmen penanggulangan kemiskinan Kabupaten Pasuruan termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 yang ditunjukkan dalam tujuan 1 yaitu “Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah” dan tujuan 2 yaitu “Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Manusia”. Masing-masing tujuan dilengkapi dengan sasaran dan program prioritas daerah untuk memprioritaskan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan. Penetapan tahapan dan prioritas pembangunan sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang harus diatasi. Meskipun program prioritas mungkin berbeda pada setiap tahapan, namun harus tetap sinkron dan konsisten dari satu periode ke periode berikutnya untuk mencapai sasaran dan tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Program prioritas pembangunan daerah adalah serangkaian inisiatif atau kegiatan yang diberikan prioritas tinggi dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan untuk daerah. Program-program ini dipilih berdasarkan analisis kebutuhan, potensi, dan tantangan yang dihadapi oleh daerah serta berdasarkan pada arah kebijakan yang telah dirumuskan dalam strategi pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya meliputi program-program unggulan OPD yang paling tinggi realisasinya bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional untuk tujuan strategis daerah berdasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Berikut ini akan dijabarkan program prioritas dalam penanggulangan kemiskinan Kabupaten Pasuruan yang diampu oleh OPD.

**Tabel 3. 2 Program Prioritas Pembangunan Daerah**

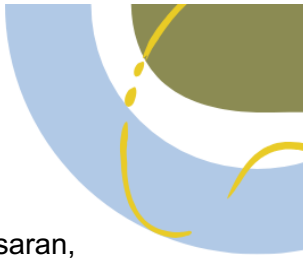
| <b>Tujuan / Sasaran</b>                                                                    | <b>Program Prioritas</b>                                                | <b>Perangkat Daerah Penanggung Jawab</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Tujuan:<br>Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah                          |                                                                         |                                          |
| Sasaran:<br>Meningkatnya produksi sector-sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah | Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian                    | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian     |
|                                                                                            | Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian                 |                                          |
|                                                                                            | Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian               |                                          |
|                                                                                            | Program penyuluhan pertanian                                            |                                          |
|                                                                                            | Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian (pertanian)        | Dinas Pertenakan dan Kesehatan Hewan     |
|                                                                                            | Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian (pertanian)     |                                          |
|                                                                                            | Program pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner |                                          |
|                                                                                            | Program perizinan usaha pertanian                                       |                                          |
|                                                                                            | Program penyuluhan pertanian                                            |                                          |
|                                                                                            | Program pengelolaan perikanan budidaya                                  | Dinas Perikanan                          |
|                                                                                            | Program pengelolaan perikanan tangkap                                   |                                          |
| Sasaran:<br>Meningkatnya produksi sector-sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah | Program Pendidikan dan latihan perkoperasian                            | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
|                                                                                            | Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi                          |                                          |
|                                                                                            | Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM) |                                          |
| Sasaran:<br>Meningkatnya produksi sector-sektor unggulan                                   | Program penataan desa                                                   | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa   |
|                                                                                            | Program administrasi pemerintahan desa                                  |                                          |

| Tujuan / Sasaran                                                                   | Program Prioritas                                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| dan potensial perekonomian daerah                                                  | Program pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum adat |                                                   |
| Sasaran:<br>Meningkatnya kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah | Program pengelolaan sumber daya air                                                 | Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang |
|                                                                                    | Program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum                    |                                                   |
|                                                                                    | Program pengelolaan dan pengembangan system air limbah                              |                                                   |
|                                                                                    | Program penataan bangunan Gedung                                                    |                                                   |
|                                                                                    | Program penataan bangunan dan lingkungannya                                         |                                                   |
|                                                                                    | Program Kawasan permukiman                                                          | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman            |
|                                                                                    | Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)                       |                                                   |
|                                                                                    | Program pengembangan perumahan                                                      |                                                   |
|                                                                                    | Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)                       | Dinas Perhubungan                                 |
| Sasaran:<br>Meningkatnya Kualitas Lingkungan                                       | Program penanggulangan bencana                                                      | Badan Penanggulangan Bencana Daerah               |
| Tujuan:<br>Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Manusia                   |                                                                                     |                                                   |
| Sasaran:<br>Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia                              | Program Rehabilitasi Sosial                                                         | Dinas Sosial                                      |
|                                                                                    | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial                                             |                                                   |
|                                                                                    | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat         | Dinas Kesehatan                                   |
|                                                                                    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                         |                                                   |
|                                                                                    | Program Pengelolaan Pendidikan                                                      | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                   |

| Tujuan / Sasaran                                                                                               | Program Prioritas                                                               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                | Program Pengembangan Kurikulum                                                  |                                         |
|                                                                                                                | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                        |                                         |
|                                                                                                                | Program Pengendalian Perizinan Pendidikan                                       |                                         |
| Sasaran:<br>Menurunnya pengangguran                                                                            | Program penempatan tenaga kerja                                                 | Dinas Ketenagakerjaan                   |
|                                                                                                                | Program pelatihan kerja dan produktivitas. Tenaga kerja                         |                                         |
| Sasaran:<br>Meningkatnya ketahanan pangan daerah                                                               | Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian    |
|                                                                                                                | Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat               |                                         |
|                                                                                                                | Program penanganan kerawanan pangan                                             |                                         |
| Tujuan:<br>Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi |                                                                                 |                                         |
| Sasaran:<br>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik                                                             | Program pendaftaran penduduk                                                    | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|                                                                                                                | Program pencatatan sipil                                                        |                                         |
|                                                                                                                | Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan                         |                                         |
|                                                                                                                | Program pengelolaan profil kependudukan                                         |                                         |

Sumber: Dokumen RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026

Berdasarkan tabel prioritas diatas dapat dilihat bahwa sasaran penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan adalah berfokus pada ketahanan pangan, infrastruktur, layanan dasar, kesempatan kerja, Pendidikan, dan Kesehatan. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, telah disusun daftar program prioritas akan yang dibahas pada bagian selanjutnya. Penentuan program prioritas ini juga didasarkan atas hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan pada periode sebelumnya. Agar kinerja



program penanggulangan kemiskinan dapat ditingkatkan dan lebih tepat sasaran, perlu disusun teknis pelaksanaan program secara umum sebagai panduan perangkat daerah dalam merencanakan, melaksanakan, serta melakukan pemantauan program penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya, perangkat daerah dapat mengembangkan teknis pelaksanaan program secara umum tersebut menjadi petunjuk teknis masing-masing program sesuai dengan kriteria penerima manfaat program.

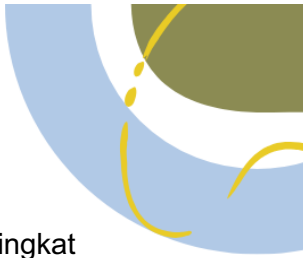
Pada dasarnya kebijakan dan strategi perlu dilakukan pemerintah untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa persoalan utama dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan tahun 2023 adalah penurunan angka kemiskinan belum mampu menjangkau pada tingkat kemiskinan ekstrem sehingga capaian angka kemiskinan ekstrem meningkat. Selain itu, meningkatnya capaian kemiskinan ekstrem tersebut berimplikasi pada peningkatan capaian pada indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Maka kebijakan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Pasuruan tahun 2024 berfokus kepada kemiskinan ekstrem agar tidak hanya menurunkan angka kemiskinan, tapi juga ikut menurunkan angka kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan.

Adapun kebijakan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Pasuruan yang dituangkan dalam Rencana Aksi Tahunan ini adalah:

- 1. Peningkatan Kebutuhan Dasar**
- 2. Meningkatkan Pemerataan Pendapatan**
- 3. Menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan**

Dalam hal ini, dimensi pada kebijakan peningkatan kebutuhan dasar adalah pada dimensi Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan Permukiman, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Penduduk dan Keluarga Berencana, Pangan, Perhubungan, dan Kebudayaan. Sementara itu dimensi pada kebijakan meningkatkan pemerataan pendapatan adalah meliputi tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat, koperasi, usaha kecil, dan menengah, kelautan dan perikanan, serta pariwisata. Adapun kebijakan ini didukung dengan strategi penanggulangan kemiskinan yang merujuk pada arahan dari Pemerintah khususnya dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

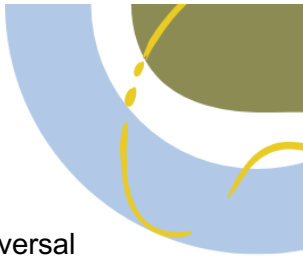
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pasuruan berfokus pada pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Hal ini dilatarbelakangi oleh



adanya perbedaan capaian antara Persentase Penduduk Miskin yang meningkat dengan capaian Kemiskinan ekstrem yang menurun, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan yang mengalami menurun. Sehingga program penanggulangan kemiskinan pada dokumen ini berfokus pada pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem agar dapat ikut menurunkan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan. Sehingga sasaran program penanggulangna kemiskinan di Kabupaten Pasuruan lebih kompleks dan dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat miskin, karena tidak hanya menjangkau pada masyarakat miskin saja, melainkan juga kepada masyarakat miskin ekstrem.

Strategi penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Pasuruan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2023 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dimana untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran dapat dilakukan dengan cara: (1) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat; (2) Peningkatan pendapatan masyarakat; dan (3) Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Adapun upaya yang akan dilakukan adalah dengan melanjutkan strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui Perbup Nomor 102 Tahun 2023 meliputi:

1. Strategi Mengurangi Beban Pengeluaran
  - a. bantuan pendidikan, seperti penyelenggaraan proses belajar non formal, pengelolaan dana BOS, serta penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk siswa tidak mampu;
  - b. bantuan sosial regular, seperti program keluarga harapan, program sembako, dan program indonesia pintar.
  - c. bantuan sosial khusus, seperti bantuan langsung tunai desa (BLT Desa), bantuan sosial tunai, bantuan sosial presiden, top-up bansos regular, dan bantuan beras;
  - d. bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi pemerlu kesejahteraan sosial (PPKS), seperti bantuan asistensi rehablitiiasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus (disabilitas dan lanjut usia);
  - e. penyediaan permakanan, penyediaan alat bantu, dan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial;

- 
- 
- f. pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat melalui Universal Health Coverage (UHC) dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Pasuruan; dan
  - g. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
2. Meningkatkan Pendapatan
- a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui program pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil (KAT) dan program perlindungan dan jaminan sosial;
  - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa;
  - c. peningkatan pendapatan melalui program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan, pelaksanaan bimbingan, serta penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan, serta program pengelolaan perikanan tangkap dan program pengelolaan perikanan budidaya;
  - d. peningkatan kapasitas umkm melalui program pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM);
  - e. peningkatan kemampuan rentan dengan program pemberdayaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, serta program penempatan tenaga kerja; dan
  - f. program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan berdasarkan unit kompetensi, serta program penempatan tenaga kerja melalui perlindungan pmi (pra dan purna penempatan) di daerah kabupaten/ kota.

- 
- 
3. Mengurangi Wilayah Kantong-kantong Kemiskinan
    - a. pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, infrastruktur sanitasi, dan air minum layak; dan
    - b. pembangunan infrastruktur pendidikan meliputi penambahan ruang kelas baru, pengembangan sarana dan prasarana dan utilitas sekolah, rehabilitas sedang/berat ruang kelas, dan rehabilitas sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah;
    - c. pemenuhan infrastruktur penunjang seperti penyelenggaraan PSU perumahan, pembangunan RTLH, jambanisasi, dan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
    - d. pemenuhan kebutuhan pangan melalui program penanganan kerawanan pangan melalui dan program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
    - e. peningkatan konektivitas antarwilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan; dan
    - f. program pengelolaan sumber daya air (SDA) melalui pembangunan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan di kawasan perdesaan.

## BAB IV

### MATRIKS TARGET KEBERHASILAN DAN LOKUS PRIORITAS

#### 4.1 Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025

Keberhasilan penanggulangan kemiskinan dinilai berdasarkan *end goals* kemiskinan sebagaimana tertuang pada SDGs/TPB. End Goals kemiskinan terdiri dari empat indikator yaitu: a) tingkat kemiskinan; b) tingkat kemiskinan ekstrem, c) angka kemiskinan multidimensi; dan d) rasio gini. Indikator end goals sebagaimana disebutkan sebelumnya, didukung dengan enam sasaran. Keenam sasaran tersebut mencakup 16 indikator utama kemiskinan. Selain itu keberhasilan penanggulangan kemiskinan juga dinilai dari tingkat persentase penduduk miskin yang berhasil diturunkan di setiap daerah. Capaian persentase penduduk miskin di Kabupaten Pasuruan tahun 2023 mengalami peningkatan dan termasuk peningkatan tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Timur. Hal ini menjadi sebuah isu strategis untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan.

Selain itu, salah satu isu strategis penanggulangan kemiskinan adalah penurunan kemiskinan ekstrem 0%. Hal ini merujuk pada instruksi Presiden bahwa target kemiskinan ekstrem tahun 2024 adalah 0%. Capaian kemiskinan ekstrem Kabupaten Pasuruan pada tahun 2023 telah mengalami penurunan menjadi 0,53%. Untuk mencapai target yang ditentukan, perlu upaya spesifik dari perangkat daerah. Matriks penurunan kemiskinan Kabupaten Pasuruan tahun 2023 terdiri dari 41 program, 60 kegiatan dan 136 sub kegiatan yang tersebar di 15 perangkat daerah.

Adapun matriks Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kabupaten Pasuruan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 1 Matriks Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025**

| Nama OPD                               | Program                                                                             | Kegiatan                                                                                                                                                                                                             | Sub Kegiatan                                                                                                 | Indikator Sub Kegiatan                                                                                                            | Target | Satuan     | Anggaran (Rp) | Sumber Anggaran        | Detail Pekerjaan/kegiatan                                                                                                                           | Keterangan                                                                                                                  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Program Kawasan Permukiman                                                          | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha                                                                                                                                    | Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh                                                               | Luas permukiman kumuh yang dipugar                                                                                                | 8      | Ha         | 384.634.707   | DAU                    | Pembangunan drainase dan TPT di Kec. Rembang                                                                                                        |                                                                                                                             |
|                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni                                                                             | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni                                                                                                     | 36     | Unit Rumah | 797.372.316   | DAU                    | Rehab rumah tidak layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah                                                                                 |                                                                                                                             |
|                                        | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)                       | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan                                                                                                                                                                                 | Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian                    | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian                         | 6      | Lokasi     | 641.218.300   | DAU                    | Pembangunan PSU (PJT, drainase dan TPT)                                                                                                             |                                                                                                                             |
|                                        | Program Pengembangan Perumahan                                                      | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota                                                                                                                               | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana                                                                       | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi                                                                    | 5      | Unit Rumah | 215.185.000   | DAU                    | Rehab rumah bagi korban bencana                                                                                                                     | Rumah korban bencana yang direhab tidak harus milik masyarakat berpenghasilan rendah (sub kegiatan sesuai tagging pada RAD) |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 2      | Dokumen    | 147.000.000   | - DAU<br>- BK Provinsi | - Memfasilitasi pemberian BK Program Jatim Puspa, Desa Berdaya dan Pemberdayaan BUMDes<br>- Melakukan pendataan, monitoring dan evaluasi pasar desa |                                                                                                                             |



| Nama OPD     | Program                                      | Kegiatan                                                          | Sub Kegiatan                                                                                                  | Indikator Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                | Target | Satuan   | Anggaran (Rp)  | Sumber Anggaran | Detail Pekerjaan/kegiatan                                                                                        | Keterangan |
|--------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|              |                                              | dalam Daerah Kabupaten/Kota                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |                |                 |                                                                                                                  |            |
| BPBD         | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA               | Pelayanan Informasi Rawan Bencana                                 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya | 3,320  | orang    | 198.520.000    | DAU             | Sosialisasi KIE yang diperuntukkan bagi warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana di Kabupaten Pasuruan |            |
| Dinas Sosial | Program perlindungan dan jaminan sosial (p1) | Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota       | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                          | Persentase data fakir miskin yang valid                                                                                                                                                                                                                               | 520    | Orang    | 59.967.000     | DAU             | Rapat koordinasi pendataan penerima bansos                                                                       |            |
|              |                                              |                                                                   | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                   | jumlah fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota yang didata                                                                                                                                                                                                         | 858000 | keluarga | 452.991.975    | DAU             | Rakor PKH                                                                                                        |            |
|              |                                              |                                                                   | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                                                              | Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembagnan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten/kota                                                                                                                                                                            | 9040   | keluarga | 21.971.775.000 | DAU/DBHC HT     | Pemberian BLT dan Bansos Kemiskinan Ekstrem                                                                      |            |
|              | Program penanganan bencana (P2)              | Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota | Penyediaan Makanan                                                                                            | jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 Hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                  | 35000  | orang    | 99.989.930     | DAU             | Pemberian bantuan permakanan bagi korban bencana                                                                 |            |

| Nama OPD | Program                          | Kegiatan                                                                                                                                           | Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Indikator Sub Kegiatan                                                                                                                                                                       | Target | Satuan | Anggaran (Rp) | Sumber Anggaran | Detail Pekerjaan/kegiatan                                                          | Keterangan |
|----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          | Program rehabilitasi sosial (P1) | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial | Penyediaan Permakanan                                                                                                                                         | jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten/kota                                                                    | 210    | orang  | 430.027.000   | DAU             | pemberian bantuan permakanan bagi anak terlantar di luar panti                     |            |
|          |                                  |                                                                                                                                                    | Penyediaan Alat Bantu                                                                                                                                         | jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota                                                                                    | 80     | orang  | 20.465.680    | DAU             | fasilitasi pemberian bantuan alat dari dinsos provinsi                             |            |
|          |                                  |                                                                                                                                                    | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial                                                                                                      | jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spriritual dan sosial kewenangan kabupaten/kota                                                                                                      | 300    | orang  | 220.602.600   | DAU             | bansos sembako bagi lansia                                                         |            |
|          |                                  |                                                                                                                                                    | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat kewenangan kabupaten/kota | 1170   | orang  | 276.154.700   | DAU             | bansos sembako anak terlantar                                                      |            |
|          |                                  |                                                                                                                                                    | Pemberian Layanan Rujukan                                                                                                                                     | jumlah orang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota                                                                                                                           | 30     | orang  | 45.500.000    | DAU             | fasilitasi pendampingan rujukan bagi anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan |            |



| Nama OPD                             | Program                                                           | Kegiatan                                                                                         | Sub Kegiatan                                                                                  | Indikator Sub Kegiatan                                                                                                       | Target | Satuan   | Anggaran (Rp) | Sumber Anggaran | Detail Pekerjaan/kegiatan                                                                                            | Keterangan                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                      | Program Pemberdayaan Sosial (P2)                                  | Pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil (KAT)                                               | Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT                                                            | Jumlah keluarga pada KAT yang mendapatkan fasilitas pemberdayaan sosial kewenangan Kabupaten/kota                            | 334    | Keluarga | 760.708.600   | DAU             | Bantuan Sembako lansia                                                                                               |                                                |
|                                      |                                                                   | Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota                           | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota             | jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat                                                        | 288    | orang    | 138.552.700   | DAU             | tali asih pilarsos (PSM)                                                                                             |                                                |
|                                      |                                                                   |                                                                                                  | Peningkatan Kemampuan Potensi tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota yang menignakt kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota | 288    | orang    | 340.152.700   | DAU             | tali asih pilarsos (TKSK)                                                                                            |                                                |
|                                      |                                                                   |                                                                                                  | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota  | jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabuapten/kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota | 72     | Keluarga | 140.000.000   | DAU             | Bimtek puskesmas/SLRT                                                                                                |                                                |
| Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal     | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                    | 8      | Laporan  | 50.000.000    | DAU             | Pelatihan olahan pangan berbasis sumber daya lokal dan sosialisasi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) | Sasaran pelaku usaha kecil olahan pangan lokal |

| Nama OPD | Program                                              | Kegiatan                               | Sub Kegiatan                                       | Indikator Sub Kegiatan                                    | Target | Satuan  | Anggaran (Rp) | Sumber Anggaran | Detail Pekerjaan/kegiatan                                                                                                                                                                                                                    | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 16     | Laporan | 845.180.300   | DAU             | Pelatihan pengembangan kedelai, pelatihan pengembangan IP400, Kebun Dinas Hortikultura, Kebun Dinas Tanaman Pangan, Promosi produk unggulan daerah, Pelatihan pasca panen jagung, SL Tata Guna Air, Pelatihan Pasca Panen Durian dan Alpukat | IP400 1 kali pertemuan sejumlah 25 orang KT Genteng Makmur Ds kluwut Kec Wonorejo, pelatihan kedelai 1x pertemuan sejumlah 25 orang di KT Sri rejeki III Ds Kolursari Kec Bangil, pelatihan pasca panen jagung 1x pertemuan sejumlah 50 orang di KT Sekar Mulyo Ds Karanglo Kec Grati, Pelatihan Pasca Panen Durian dan Alpukat di KWT Sri Rejeki Ds Tambaksari Kec Purwodad, Promosi produk unggulan dilaksanakan di tingkat lokal, regional dan nasional, menyesuaikan event dan ketersediaan anggaran. (menunjang juga di Ketahanan Pangan) |

| Nama OPD | Program                                                   | Kegiatan                                                         | Sub Kegiatan                                                                                  | Indikator Sub Kegiatan                                                                                                  | Target  | Satuan | Anggaran (Rp) | Sumber Anggaran | Detail Pekerjaan/kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                      | Keterangan                                                      |
|----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|          | Program Penyuluhan Pertanian                              | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa                               | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                          | 15 unit | unit   | 1.905.711.801 | DBHCHT          | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa (Pelatihan Budidaya Tembakau, Pengembangan Pola Kemitraan, Pelatihan Pasca Panen, Pelatihan Penerapan PHT dan Pengendalian OPT, Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik, Pelatihan Manajemen Agribisnis, Pelatihan Penentuan Grade ) | Kabupaten Pasuruan                                              |
|          | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | 10 Ha   | Ha     | 250.000.000   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
|          |                                                           |                                                                  |                                                                                               | - SLPHT Tanaman Pangan dan Hortikultura                                                                                 |         |        |               | DAU             | dilaksanakan 12 kali pertemuan                                                                                                                                                                                                                                                                 | KT Madu Legi Ds Plintahan Kec Pandaan (Rp.75.000.000)           |
|          |                                                           |                                                                  |                                                                                               | - SLAH Tanaman Pangan dan Hortikultura                                                                                  |         |        |               | DAU             | dilaksanakan 2 kali pertemuan                                                                                                                                                                                                                                                                  | KT Sri Rejeki II Ds. Kambinganrejo Kec Grati (Rp. 25.000.000)   |
|          |                                                           |                                                                  |                                                                                               | - SLAH Tanaman Pangan dan Hortikultura                                                                                  |         |        |               | DAU             | dilaksanakan 2 kali pertemuan                                                                                                                                                                                                                                                                  | KT Sumber Rejeki II Ds.Kedawung Wetan Kec Grati (Rp.25.000.000) |

| Nama OPD | Program                                                 | Kegiatan                        | Sub Kegiatan                                                           | Indikator Sub Kegiatan                                                           | Target | Satuan | Anggaran (Rp) | Sumber Anggaran | Detail Pekerjaan/kegiatan               | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                         |                                 |                                                                        | - SLTata Guna Air                                                                |        |        |               | DAU             | dilaksanakan 3 kali pertemuan           | SLTGA Desa Rowogempol Kec. Lekok (Rp. 25.000.000)                                                                                                                                                                                                                              |
|          |                                                         |                                 |                                                                        | - SLPHT Tanaman Perkebunan                                                       |        |        |               | DAU             | dilaksanakan 10 kali pertemuan          | KT. Podo Joyo Desa Puspo Kec. Puspo (Rp. 50.000.000)                                                                                                                                                                                                                           |
|          |                                                         |                                 |                                                                        | - Sekolah Lapang Iklim SLI                                                       |        |        |               | DAU             | dilaksanakan 12 kali                    | KT Dadi Makmur I Ds Purwodadi Kec Purwodadi (Rp. 50.000.000)                                                                                                                                                                                                                   |
|          | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Pembangunan Prasarana Pertanian | Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani              | Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara | 5      | Unit   | 291.199.800   | DAU             | Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani | lokasi di KT. Gunting Ds. Rowogempol Kec. Lekok (menunjang juga di Ketahanan Pangan)                                                                                                                                                                                           |
|          |                                                         |                                 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani            | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara                    | 35     | Unit   | 478.552.000   | DAU, DBHCHT     | Pembangunan Jalan usaha Tani            | Lokasi : (menunjang juga di Ketahanan Pangan)<br>1. KT. Tegal Arum Ds. Puspo Kec. Puspo (DAU)<br>2. KT. Mulyo Rejo Ds. kedungrejo Kec. Winongan (DBHCHT)<br>keterangan : setelah survey ulang pada 7 februari 2025 lokasi sudah ada bangunan sehingga tidak bisa dilaksanakan. |
|          |                                                         |                                 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara  | 35     | Unit   | 294.999.900   | DAU             | Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah  | Lokasi KT. Tunas Tani Ds. Dandangendis Kec. Nguling (menunjang juga                                                                                                                                                                                                            |

| Nama OPD                                | Program                                                                  | Kegiatan                                                                                                                                                         | Sub Kegiatan                                                      | Indikator Sub Kegiatan                                                            | Target | Satuan      | Anggaran (Rp)  | Sumber Anggaran                    | Detail Pekerjaan/kegiatan                                                | Keterangan                                                           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                   |        |             |                |                                    |                                                                          | di Ketahanan Pangan)                                                 |
| Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) | Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro                        | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro                   | 10     | Unit Usaha  | 150.000.000    | DAU                                | Gelar Produk Usaha Mikro Tingkat Regional dan Tingkat Nasional : 2 event |                                                                      |
| Dinas Sumber Daya Air dan Cipta Karya   | Program Pengelolaan Sumber Daya Air                                      | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota          | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan                           | Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan                                      | 12     | Km          | 21.531.383.416 | Pajak rokok, DAU SG, DAK, RR, DAU, | Rehabilitasi Jaringan Irigasi                                            | Mendukung indikator ketahanan pangan                                 |
|                                         | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum         | Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota                                                                         | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan | 83     | liter/detik | 2.899.144.146  | DAU SG, pajak rokok                | Pembangunan tandon air, pembangunan broncap                              | Rumah Tangga Terindikasi Stunting, Kekeringan dan Kemiskinan Ekstrem |
|                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                  | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun     | 83     | liter/detik | 2.519.880.000  | DAU, pajak rokok                   | Pembangunan perpipaan (baru atau lanjutan), pembangunan sumur bor        | Rumah Tangga Terindikasi Stunting, Kekeringan dan Kemiskinan Ekstrem |



| Nama OPD        | Program                                                | Kegiatan                                                                            | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target | Satuan               | Anggaran (Rp) | Sumber Anggaran | Detail Pekerjaan/kegiatan                                                                                                                                                   | Keterangan                                                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                        |                                                                                     | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                                                                   | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                                                              | 4039   | SR                   | 220.543.680   | pajak rokok     | Pembangunan perpipaan dan sambungan rumah                                                                                                                                   | Rumah Tangga Terindikasi Stunting, Kekeringan dan Kemiskinan Ekstrem |
|                 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman                                              | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun                                                                        | 2      | M <sup>3</sup> /Hari | 170.496.000   | DAU SG          | Pembangunan MCK komunal, IPAL komunal, septik komunal                                                                                                                       | Rumah Tangga Terindikasi Stunting dan Kemiskinan Ekstrem             |
| Dinas Perikanan | Program pengelolaan perikanan budidaya                 | Pemberdayaan pembudi daya ikan kecil                                                | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                    | Jumlah kelompok pembudi daya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas (kelompok)                                                                                | 20     | Kelompok             | 88.269.900    | DAU             | 1. Sekolah lapang budidaya lele (Bulekpras)<br>2. Pembinaan Pokdakan                                                                                                        |                                                                      |
|                 |                                                        |                                                                                     | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah kelompok usaha yang memperoleh pendampingan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (kelompok) | 10     | kelompok             | 106.522.000   | DAU             | Pelatihan pakan mandiri                                                                                                                                                     |                                                                      |
|                 |                                                        | Pengelolaan pembudidayaan ikan                                                      | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                      | Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota                                                                                                | 5      | unit                 | 763.360.000   | DAU             | 1. Normalisasi saluran Raci I<br>2. Jembatan tambak Raci V<br>3. Jalan produksi Kugar Garam Mas<br>4. Jalan produksi Tambakan Gedang Jaya<br>5. 'Jalan produksi mina Semare |                                                                      |



| Nama OPD | Program                               | Kegiatan                                                                                                                                              | Sub Kegiatan                                                                                    | Indikator Sub Kegiatan                                                                      | Target | Satuan   | Anggaran (Rp) | Sumber Anggaran | Detail Pekerjaan/kegiatan                                                                                                                                    | Keterangan |
|----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          |                                       |                                                                                                                                                       | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota          | jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota                       | 5      | unit     | 210.800.000   | DAU             | Paket bantuan budidaya air tawar berupa benih lele dan pakan                                                                                                 |            |
|          |                                       |                                                                                                                                                       | Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | Jumah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan            | 1      | dokumen  | 43.642.000    | DAU             | Pendampingan kampung ikan                                                                                                                                    |            |
|          | Program Pengelolaan perikanan tangkap | Pengelolaan penangkasn ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap                                                       | Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia                            | 1.426  | unit     | 837.844.000   | DAU             | Pembinaan Teknis Nelayan disertai pemberian bahan alat tangkap ramah lingkungan                                                                              |            |
|          |                                       |                                                                                                                                                       | Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota                                          | jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya                                            | 80     | orang    | 133.622.500   | DAU             | 1. Pelatihan Teknis Nelayan (Perawatan Mesin Perahu) di UPT PTKP3 Probolinggo<br>2. Pembinaan Keselamatan Kerja Nelayan di UPT Latihan Kerja Daerah Pasuruan |            |
|          |                                       | Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota                                                                                                | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil                                                            | jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya                                            | 80     | orang    | 133.622.500   | DAU             | 1. Pelatihan Teknis Nelayan (Perawatan Mesin Perahu) di UPT PTKP3 Probolinggo<br>2. Pembinaan Keselamatan Kerja Nelayan di UPT Latihan Kerja Daerah Pasuruan |            |
|          |                                       |                                                                                                                                                       | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil                   | jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya | 3      | kelompok | 22.852.400    | DAU             | Sosialisasi Pembentukan KUB                                                                                                                                  |            |



| Nama OPD              | Program                                                     | Kegiatan                                          | Sub Kegiatan                                                                                               | Indikator Sub Kegiatan                                                                                | Target      | Satuan     | Anggaran (Rp)  | Sumber Anggaran | Detail Pekerjaan/kegiatan                                                                                                                                                                  | Keterangan |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                       |                                                             |                                                   | Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha                               | jumlah unit usaha yang difasilitasi penyaluran bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha | 2           | unit usaha | 437.501.500    | DAU             | 1. Sosialisasi Asuransi Nelayan/BPJS Ketenagakerjaan<br>2. Rapat Koordinasi Asuransi Nelayan/BPJS Ketenagakerjaan<br>3. Pemberian premi asuransi untuk 1800 nelayan (BPJS Ketenagakerjaan) |            |
| Dinas Ketenagakerjaan | Program Penempatan Tenaga Kerja                             | Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota     | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan                                                   | Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD                                | 10          | Orang      | 35.000.000     | DAU             | Sosialisasi Disabilitas                                                                                                                                                                    |            |
|                       |                                                             |                                                   | Pelayanan antar kerja                                                                                      | Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL                                     | 100 orang   | Orang      | 75.000.000     | DAU             | Pelayanan AK1/lowongan Pekerjaan                                                                                                                                                           |            |
|                       |                                                             |                                                   | Perluasan kesempatan kerja                                                                                 | Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja                      | 40 Orang    | Orang      | 5.000.000      | DAU             |                                                                                                                                                                                            |            |
|                       | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja (P1) | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n                         | 900 Peserta | peserta    | 15.150.000.000 | DBHCHT          | Pelatihan Kompetensi                                                                                                                                                                       |            |

| Nama OPD                                | Program                                  | Kegiatan                                                                                                                                             | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Sub Kegiatan                                                                                                                                   | Target            | Satuan          | Anggaran (Rp) | Sumber Anggaran                | Detail Pekerjaan/kegiatan                                                                                                                                                                   | Keterangan |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                         | Program Hubungan Industrial              | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana HI Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan                | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/ PKB, Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit dan Pekerja yang terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | 6 Laporan         | Laporan         | 2.100.693.999 | DBHCHT/DAU                     | 1. Sosialisasi Asuransi Nelayan/BPJS Ketenagakerjaan<br>2. Rapat Koordinasi Asuransi Nelayan/BPJS Ketenagakerjaan<br>3. Pemberian premi asuransi untuk 11400 nelayan (BPJS Ketenagakerjaan) |            |
|                                         | Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                        | Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                | Jumlah transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan                                                                                                      | 2 Kepala Keluarga | Kepala keluarga | 5.000.000     | DAU                            | Sosialisasi Transmigrasi                                                                                                                                                                    |            |
| DP3AP2KB                                | Program Perlindungan Perempuan           | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota                             | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah layanan tindak lanjut penguatan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota             | 30 layanan        | layanan         | 128.360.000   | DAU, DAK Non Fisik PPA, DAU SG | Pelayanan Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan                                                                                                                                    |            |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Program Pendaftaran Penduduk             | Penataan pendaftaran penduduk                                                                                                                        | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan         | jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP-EI formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia                  | 1paket            | paket           | 221.500.000   | DAU                            | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, Blangko KIA dan plastik KK                                                                                                  |            |
|                                         | Program Pencatatan Sipil                 | Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                                           | Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil                                                                                          | Jumlah layanan pencatatan sipil                                                                                                                          | 24 Layanan        | Layanan         | 46.360.000    | DAU                            | Peningkatan dalam pelayanan                                                                                                                                                                 |            |

| Nama OPD | Program                                                 | Kegiatan                                                                          | Sub Kegiatan                                                                            | Indikator Sub Kegiatan                                                                  | Target      | Satuan  | Anggaran (Rp) | Sumber Anggaran | Detail Pekerjaan/kegiatan                                                  | Keterangan |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
|          |                                                         |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                         |             |         |               |                 | Dokumen pencatatan sipil                                                   |            |
|          | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan                                              | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang diolah dan disajikan                              | 365 Dokumen | Dokumen | 11.400.000    | DAU             | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan dalam satu tahun                |            |
|          |                                                         | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                   | Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                      | Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan         | 10 Laporan  | Laporan | 79.925.000    | DAU             | Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan         |            |
|          | Program Pengelolaan Profil Kependudukan                 | Penyusunan Profil Kependudukan                                                    | Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota                                             | Jumlah data kependudukan Kabupaten / Kota                                               | 24 Dokumen  | Dokumen | 18.687.006    | DAU             | Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota di 24 kecamatan                |            |
|          |                                                         |                                                                                   | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain | 56 Dokumen  | Dokumen | 98.011.000    | DAU             | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Kab Pasuruan |            |

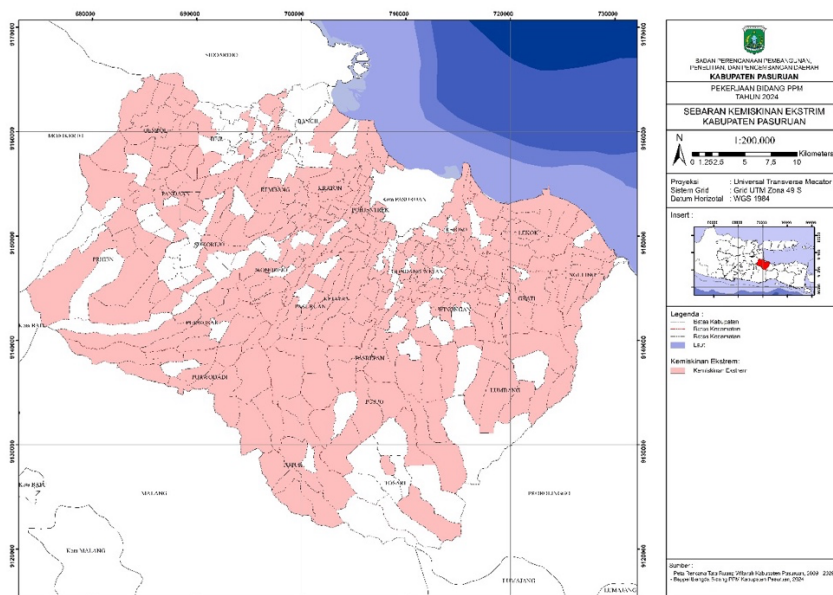


| Nama OPD                             | Program                                                                          | Kegiatan                                                                             | Sub Kegiatan                                                    | Indikator Sub Kegiatan                                                         | Target | Satuan  | Anggaran (Rp)          | Sumber Anggaran                                                                                                                                                   | Detail Pekerjaan/kegiatan                                    | Keterangan |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                     | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                                     | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 23     | Unit    | Rp754.050.000          | Pelatihan teknis dan bantuan peternakan ulat sutra, bantuan 4 grobak stmj/bakso sakera, bantuan peralatan silase 10 kelompok, bantuan peralatanko mpos 9 kelompok | Anggaran masih bisa berubah, menunggu kepastian Refocusing   |            |
| Dinas Kesehatan                      | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (P1) | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan kesehatan masyarakat                  | 36     | Dokumen | 157.495.420.131        | DAU SG, DBHCHT, PAJAK ROKOK                                                                                                                                       | Pembiayaan iuran jaminan kesehatan, Pembayaran Biakes Maskin |            |
| <b>TOTAL</b>                         |                                                                                  |                                                                                      |                                                                 |                                                                                |        |         | <b>237.816.730.687</b> |                                                                                                                                                                   |                                                              |            |

## 4.2 Lokus Prioritas

Di setiap wilayah, untuk suatu pokok masalah kemiskinan, bentuk maupun bobot dari akar masalah tersebut sangat mungkin berbeda antar daerah. Peta sebaran determinan masalah antar sub-wilayah dapat berupa grafik empat kuadran, dimana setiap kuadran akan menunjukkan posisi relatif sub-wilayah dalam suatu konstalasi masalah yang dibentuk oleh pasangan indikator tujuan (goal) dan capaian antara (intermediate outcome) yang telah teruji memiliki pengaruh terhadap tujuan yang bersangkutan.

Mengacu kepada grafik ini, untuk mengatasi masalah yang dinyatakan oleh indikator tujuan (goal/impact) atau indikator utama (sumbu horisontal), melalui intervensi terhadap indikator sasaran antara (intermediate outcome) atau indikator pendukungnya (sumbu vertikal), wilayah-wilayah yang berada pada kuadran dimana capaian kedua indikator tersebut relatif buruk harus menjadi wilayah yang paling diprioritaskan. Dengan adanya Analisis prioritas Wilayah wilayah, diharapkan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan dapat dikerjakan dengan efektif dan tepat sasaran. Adapun gambaran wilayah Kabupaten Pasuruan berdasarkan peta sebaran kemiskinan ekstrem adalah sebagai berikut:



**Gambar 4. 1 Peta Sebaran Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Pasuruan**

### 1. Analisis nilai indeks kesulitas geografis

Indeks Kesulitan Geografis yang selanjutnya disingkat IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu wilayah berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur,

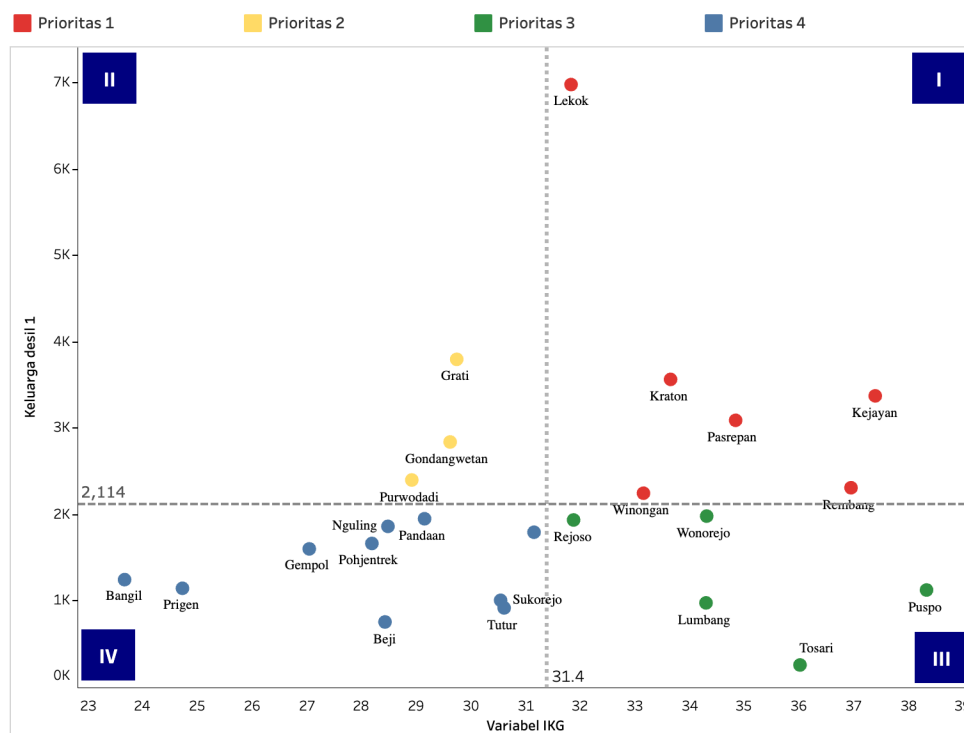
transportasi, dan komunikasi. Analisis prioritas Wilayah intervensi berdasarkan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) di Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

Prioritas 1 : Pasrepan, Kejayan, Rembang, Kraton, Winongan, Dan Lekok

Prioritas 2 : Purwodadi, Gondangwetan, Dan Grati

Prioritas 3 : Puspo, Lumbang, Wonorejo, Rejoso, Dan Tosari

Prioritas 4 : Tukur, Purwosari, Sukorejo, Prigen, Pandaan, Gempol, Beji, Bangil, Pohjentrk, Dan Nguling.



**Gambar 4. 2 Grafik Wilayah Indeks Kesulitan Geografis (IKG)**

## 2. Analisis Prioritas Wilayah Intervensi berdasarkan Indeks Dimensi Pelayanan Dasar

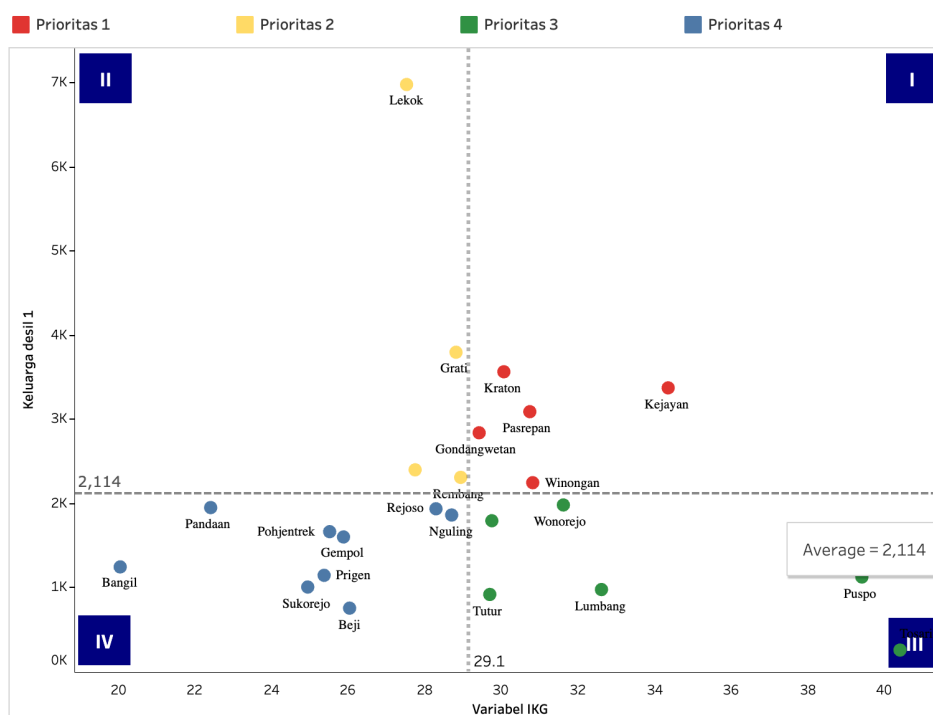
Analisis prioritas wilayah intervensi berdasarkan indeks pelayanan dasar di Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

Prioritas 1 : Pasrepan, Kejayan, Kraton, Gondangwetan, Dan Winongan

Prioritas 2 : Purwodadi, Rembang, Grati, Dan Lekok

Prioritas 3 : Tuter, Puspo, Lumbang, Wonorejo, Purwosari, Dan Tosari

Prioritas 4 : Sukorejo, Prigen, Pandaan, Gempol, Beji, Bangil, Pohjentrek, Nguling, Dan Rejoso



**Gambar 4. 3 Grafik Wilayah Indeks Dimensi Pelayanan Dasar**

### 3. Analisis prioritas Wilayah intervensi berdasarkan Indeks Dimensi Infrastruktur

Analisis prioritas Wilayah intervensi berdasarkan Indeks Dimensi Infrastruktur di Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

Prioritas 1 : Purwodadi, Pasrepan, Kejayan, Rembang, Gondangwetan, Dan Lekok

Prioritas 2 : Kraton, Winongan, Dan Grati

Prioritas 3 : Tuter, Puspo, Lumbang, Wonorejo, Dan Nguling

Prioritas 4 : Purwosari, Sukorejo, Prigen, Gempol, Beji, Bangil, Pohjentrek, Rejoso, Dan Tosari



Analisis prioritas Wilayah intervensi berdasarkan Indeks Dimensi Aksesibilitas di Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

Prioritas 4 : Tuttur, Lumbang, Prigen, Gempol, Beji, Bangil, Pohjentrk, Dan Nguling



Adapun lokus Prioritas Penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pasuruan terletak di 24 kecamatan dan 332 Desa/kelurahan sebagai berikut:

**Tabel 4. 2 Sebaran Data Kemiskinan Ekstrem Persentil 1 Per Desa/Kelurahan di Kabupaten Pasuruan tahun 2024**

| Kecamatan / Desa    | Jumlah     |
|---------------------|------------|
| <b>BANGIL</b>       | <b>74</b>  |
| DERMO               | 13         |
| GEMPENG             | 3          |
| KALIREJO            | 1          |
| KAUMAN              | 2          |
| KERSIKAN            | 14         |
| KIDULDALEM          | 31         |
| RACI                | 8          |
| TAMBAKAN            | 2          |
| <b>BEJI</b>         | <b>48</b>  |
| BAUJENG             | 17         |
| GUNUNG GANGSIR      | 15         |
| PAGAK               | 7          |
| SIDOWAYAH           | 5          |
| WONOKOYO            | 4          |
| <b>GEMPOL</b>       | <b>191</b> |
| BULUSARI            | 20         |
| CARAT               | 9          |
| GEMPOL              | 6          |
| JERUK PURUT         | 12         |
| KARANGREJO          | 10         |
| KEJAPANAN           | 8          |
| KEPULUNGAN          | 5          |
| LEGOK               | 14         |
| NGERONG             | 18         |
| RANDUPITU           | 6          |
| WATUKOSEK           | 19         |
| WINONG              | 7          |
| WONOSARI            | 12         |
| WONOSUNYO           | 45         |
| <b>GONDANGWETAN</b> | <b>549</b> |
| BAYEMAN             | 26         |
| BRAMBANG            | 27         |
| GONDANG WETAN       | 61         |
| GONDANGREJO         | 32         |




| Kecamatan / Desa | Jumlah     |
|------------------|------------|
| GROGOL           | 3          |
| KALIREJO         | 78         |
| KARANGSENTUL     | 34         |
| KEBON CANDI      | 25         |
| KERSIKAN         | 24         |
| LAJUK            | 10         |
| PATEGUHAN        | 100        |
| PEKANGKUNGAN     | 32         |
| RANGGEH          | 17         |
| WONOJATI         | 39         |
| WONOSARI         | 41         |
| <b>GRATI</b>     | <b>818</b> |
| CUKURGONDANG     | 65         |
| GRATITUNON       | 88         |
| KALIPANG         | 213        |
| KAMBINGANREJO    | 31         |
| KARANGKLIWON     | 38         |
| KARANGLO         | 90         |
| KEBONREJO        | 18         |
| KEDAWUNGKULON    | 45         |
| KEDAWUNGWETAN    | 61         |
| PLOSOSARI        | 15         |
| RANUKLINDUNGAN   | 5          |
| REBALAS          | 90         |
| SUMBERAGUNG      | 6          |
| SUMBERDAWESARI   | 47         |
| TREWUNG          | 6          |
| <b>KEJAYAN</b>   | <b>614</b> |
| AMBAL AMBIL      | 58         |
| BENERWOJO        | 50         |
| COBANJOYO        | 12         |
| KEDEMUNGAN       | 37         |
| KEDUNGPENGARON   | 14         |
| KEJAYAN          | 23         |
| KEPUH            | 80         |
| KETANGIREJO      | 19         |
| KLANGRONG        | 4          |
| KLINTER          | 21         |
| KURUNG           | 17         |



| Kecamatan / Desa     | Jumlah      |
|----------------------|-------------|
| LOROKAN              | 6           |
| ORO ORO PULEH        | 3           |
| PACAR KELING         | 22          |
| RANDUGONG            | 34          |
| SLADI                | 7           |
| SUMBER BANTENG       | 5           |
| SUMBER SUKO          | 43          |
| TANGGULANGIN         | 35          |
| TUNDOSURO/TUNDOSOR O | 2           |
| TUNDOSURO/TUNDOSORO  | 15          |
| WANGKALWETAN         | 21          |
| WRATI                | 86          |
| <b>KRATON</b>        | <b>778</b>  |
| ASEM KANDANG         | 162         |
| BENDUNGAN            | 17          |
| CURAHDUKUH           | 13          |
| DHOMPO               | 33          |
| GAMBIRKUNING         | 13          |
| JERUK                | 15          |
| KALIREJO             | 37          |
| KARANGANYAR          | 5           |
| KEBOTOHAN            | 41          |
| KRATON               | 45          |
| NGABAR               | 14          |
| NGEMPIT              | 15          |
| PLINGGISAN           | 17          |
| PUKUL                | 73          |
| PULOKERTO            | 14          |
| REJOSARI             | 35          |
| SELOTAMBAK           | 49          |
| SEMARE               | 14          |
| SIDOGIRI             | 16          |
| SLAMBRIT             | 106         |
| TAMBAK REJO          | 20          |
| TAMBAKSARI           | 24          |
| <b>LEKOK</b>         | <b>2626</b> |
| ALAS TLOGO           | 144         |
| BALONGANYAR          | 445         |
| BRANANG              | 400         |

| Kecamatan / Desa | Jumlah     |
|------------------|------------|
| GEJUGJATI        | 278        |
| JATIREJO         | 148        |
| PASINAN          | 130        |
| ROWOGEMPOL       | 454        |
| SEMEDUSARI       | 100        |
| TAMBAKLEKOK      | 43         |
| TAMPUNG          | 14         |
| WATES            | 470        |
| <b>LUMBANG</b>   | <b>109</b> |
| BANJARIMBO       | 29         |
| BULU KANDANG     | 6          |
| CUKUR GULING     | 21         |
| KARANG ASEM      | 8          |
| KARANG JATI      | 14         |
| KRONTA           | 3          |
| LUMBANG          | 17         |
| PANDITAN         | 11         |
| <b>NGULING</b>   | <b>578</b> |
| DANDANGGENDIS    | 14         |
| KEDAWANG         | 6          |
| MLATEN           | 3          |
| NGULING          | 75         |
| SANGANOM         | 29         |
| SEBALONG         | 12         |
| SEDARUM          | 5          |
| SUDIMULYO        | 11         |
| SUMBERANYAR      | 132        |
| WATESTANI        | 21         |
| WATUPRAPAT       | 252        |
| WOTGALIH         | 18         |
| <b>PANDAAN</b>   | <b>127</b> |
| BANJARKEJEN      | 26         |
| BANJARSARI       | 5          |
| KARANGJATI       | 4          |
| KEBONWARIS       | 5          |
| KEMIRISEWU       | 11         |
| KUTOREJO         | 6          |
| NOGOSARI         | 7          |
| PANDAAN          | 6          |

| Kecamatan / Desa  | Jumlah     |
|-------------------|------------|
| SEBANI            | 14         |
| SUMBERGEDANG      | 13         |
| SUMBERREJO        | 15         |
| TAWANGREJO        | 5          |
| TUNGGULWULUNG     | 7          |
| WEDORO            | 3          |
| <b>PASREPAN</b>   | <b>694</b> |
| AMPEL SARI        | 43         |
| CENGKRONG         | 29         |
| GALIH             | 111        |
| JOGOREPUH         | 20         |
| MANGGUAN          | 33         |
| NGANTUNGAN        | 72         |
| PASREPAN          | 16         |
| PETUNG            | 69         |
| POHGEDANG         | 38         |
| REJOSALAM         | 22         |
| SAPULANTE         | 64         |
| SIBON             | 45         |
| TAMBAK REJO       | 85         |
| TEMPURAN          | 47         |
| <b>POHJENTREK</b> | <b>307</b> |
| LOGOWOK           | 5          |
| PARASREJO         | 68         |
| PLERET            | 37         |
| SUKOREJO          | 43         |
| SUNGIKULON        | 51         |
| SUNGIWETAN        | 48         |
| SUSUKAN REJO      | 17         |
| TIDU              | 24         |
| WARUNGOWO         | 14         |
| <b>PRIGEN</b>     | <b>81</b>  |
| BULUKANDANG       | 12         |
| CANDIWATES        | 11         |
| DAYUREJO          | 5          |
| GAMBIRAN          | 5          |
| JATIARJO          | 6          |
| KETANIRENG        | 5          |
| PECALUKAN         | 10         |




| Kecamatan / Desa | Jumlah     |
|------------------|------------|
| SUKOLELO         | 6          |
| SUKORENO         | 5          |
| WATUAGUNG        | 16         |
| <b>PURWODADI</b> | <b>271</b> |
| CAPANG           | 28         |
| COWEK            | 1          |
| DAWUHANSENGON    | 5          |
| GAJAHREJO        | 25         |
| GERBO            | 8          |
| JATISARI         | 68         |
| LEBAK REJO       | 12         |
| PAREREJO         | 55         |
| PUCANG SARI      | 8          |
| PURWODADI        | 9          |
| SEMUT            | 43         |
| SENTUL           | 4          |
| TAMBAK SARI      | 5          |
| <b>PURWOSARI</b> | <b>199</b> |
| BAKALAN          | 62         |
| KARANGREJO       | 23         |
| KAYOMAN          | 4          |
| KERTOSARI        | 10         |
| MARTOPURO        | 20         |
| PAGER            | 29         |
| PUCANG SARI      | 8          |
| SEKARMOJO        | 6          |
| SENGONAGUNG      | 6          |
| SUKODERMO        | 7          |
| SUMBERREJO       | 4          |
| SUMBERSUKO       | 15         |
| TEJOWANGI        | 5          |
| <b>PUSPO</b>     | <b>171</b> |
| JANJANGWULUNG    | 17         |
| JIMBARAN         | 61         |
| KEDUWUNG         | 5          |
| PALANGSARI       | 14         |
| PUSPO            | 48         |
| PUSUNG MALANG    | 26         |
| <b>REJOSO</b>    | <b>364</b> |



| Kecamatan / Desa  | Jumlah     |
|-------------------|------------|
| ARJOSARI          | 5          |
| JARANGAN          | 11         |
| KARANGPANDAN      | 11         |
| KAWISREJO         | 33         |
| KETEGAN           | 22         |
| PANDANREJO        | 68         |
| REJOSO KIDUL      | 50         |
| REJOSO LOR        | 11         |
| SADENGREJO        | 37         |
| SAMBIREJO         | 55         |
| SEGOROPURO        | 21         |
| TOYANING          | 40         |
| <b>REMBANG</b>    | <b>490</b> |
| GENENGWARU        | 13         |
| KALISAT           | 138        |
| KANIGORO          | 11         |
| KEDUNG BANTENG    | 22         |
| KRENGIH           | 41         |
| ORO-ORO OMBOKULON | 5          |
| ORO-ORO OMBOWETAN | 27         |
| ORO-OROBULU       | 113        |
| PAJARAN           | 5          |
| PEJANGKUNGAN      | 8          |
| REMBANG           | 39         |
| SIYAR             | 14         |
| SUMBERGLAGAH      | 52         |
| TAMPUNG           | 2          |
| <b>SUKOREJO</b>   | <b>83</b>  |
| LECARI            | 4          |
| CANDIBINANGUN     | 4          |
| KENDURUAN         | 33         |
| LECARI            | 7          |
| SEBANDUNG         | 3          |
| SUKORAME          | 12         |
| SUKOREJO          | 7          |
| SUWAYUWO          | 13         |
| <b>TOSARI</b>     | <b>47</b>  |
| PODOKOYO          | 4          |
| SEDAENG           | 43         |

| Kecamatan / Desa   | Jumlah       |
|--------------------|--------------|
| <b>TUTUR</b>       | <b>86</b>    |
| ANDONO SARI        | 6            |
| BLARANG            | 4            |
| GENDRO             | 11           |
| KAYUKEBEK          | 9            |
| NGEMBAL            | 30           |
| SUMBER PITU        | 15           |
| TLOGOSARI          | 6            |
| TUTUR              | 5            |
| <b>WINONGAN</b>    | <b>544</b>   |
| BANDARAN           | 7            |
| GADING             | 9            |
| JELADRI            | 21           |
| KANDUNG            | 6            |
| KEDUNGREJO         | 20           |
| LEBAK              | 94           |
| MENDALAN           | 158          |
| MENYARIK           | 68           |
| MINGGIR            | 40           |
| PENATAAN           | 5            |
| PRODO              | 70           |
| SIDEPAN            | 11           |
| SUMBERREJO         | 3            |
| WINONGAN KIDUL     | 24           |
| WINONGAN LOR       | 8            |
| <b>WONOREJO</b>    | <b>208</b>   |
| COBANBLIMBING      | 6            |
| KARANGASEM         | 8            |
| KARANGJATIANYAR    | 7            |
| KARANGMENGGAH      | 7            |
| KARANGSONO         | 5            |
| KENDANGDUKUH       | 20           |
| KLUWUT             | 69           |
| PAKIJANGAN         | 10           |
| SAMBISIRAH         | 7            |
| TAMANSARI          | 17           |
| WONOREJO           | 24           |
| WONOSARI           | 28           |
| <b>Grand Total</b> | <b>10057</b> |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pada dasarnya RAT Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada arah kebijakan yang tertuang di dalam RPKD Tahun 2024-2026. Selanjutnya diharapkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2025 berpedoman pada substansi yang tertuang dalam RAT ini. Prinsip utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang komprehensif yaitu melalui perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial, peningkatan akses pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, serta pembangunan yang inklusif. Berdasarkan prinsip tersebut, penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro serta kecil; dan membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Strategi tersebut dilakukan melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, antara lain melalui program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Maka diharapkan upaya penanggulangan kemiskinan tersebut dapat meningkatkan kemampuan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan, kemiskinan ekstrem, dan juga ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Kabupaten Pasuruan.



Bappelitbangda  
Kabupaten Pasuruan